

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN  
(STUDI KASUS PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
DI KABUPATEN KARIMUN 2011)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh

**IRIL PAHMI**  
**10775000042**



**PROGRAM S.1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2013**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KARIMUN 2011)**

Oleh:

**IRIL PAHMI**

*Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah proses penerapan atau implementasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karimun dengan salah satu programnya yaitu pengentasan rumah tidak layak huni tahun 2011 berdasarkan keluaran kebijakan, kepatuhan kelompok sasaran, dampak nyata kebijakan dan persepsi terhadap kebijakan tersebut.*

*Didalam penelitian ini penulis menggunakan data premier data sekunder sebagai acuan untuk mengambil sumber data. Adapun sampel diambil dengan menggunakan teori Slovin, jumlah sampelnya diketahui dengan menggunakan rumus Slovin, selanjutnya teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling ( sampel acak sederhana) yang berdasarkan teori Sugiono yaitu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode diskriptif yaitu data yang diperoleh dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian penulis menginterpretasikan terhadap hasil yang relevan untuk diambil kesimpulan dan saran.*

*Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan berdasarkan berbagai sumber data dari penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan dengan objek kajian rumah tidak layak huni sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten karimun no.5 tahun 2011. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu berupa kurangnya dana atau jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat serta pemahaman dari kebijakan itu sendiri.*

**Kata Kunci : Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil ‘alamin puji dan syukur akan selalu dilafazkan kepada Allah SWT karena atas izin Nya-lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri judul “Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karimun 2011)”.

Shalawat dan salam semoga selalu kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita umat islam. Semoga dengan terus bershalawat kita akan mendapatkan syafaat darinya kelak.

Skripsi atau karya tulis ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua orang yang mengenali saya dan berbuat baik kepada saya yang memberikan motivasi kepada saya, terutama ucapan itu saya sampaikan kepada :

1. Kepada Allah swt. Atas segala kasih sayang yang diberikan-Nya dan atas segala nikmat yang telah diberikan telah membuat segala kemudahan.

2. Keluarga tercinta, kepada ayahanda (M.Yusuf M.Pd) terima kasih atas segalanya yang telah diberikan kepadaku didalam hidup, Ibunda (Alm Syarifah Zamaniah) terima kasih telah melahirkanku dan bisa mengenal hidup sebagai manusia, Mak Adek ( Raja Hamidah) terimakasih atas segalanya dan kepada adik-adik ku terimakasih atas motivasinya.
3. Bapak Prof.DR.H.M Nazir sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak DR.Mahendra Romus,M.Ec, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak Drs. Almasri,Msi sebagai Dosen Pembimbing Akademis saya selama 6 tahun.
6. Bapak Afrizal,S.Sos,M.Si sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara yang telah banyak memberikan motivasi dan selalu meluangkan waktu demi kesuksesan semua mahasiswa.
7. Bapak Mashuri, MA sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Rusdi sebagai sekretaris dan Ibu Sri serta staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti didalam kehidupan saya.

10. Bapak Hurnaini dan Istanto sebagai Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Karimun serta semua staf dan jajarannya yang telah banyak membantu disaat proses penelitian serta masyarakat Kabupaten Karimun.
11. Untuk yang tercinta Lidya Wati S.Pd terimakasih atas masukan dan semangat yang diberikan yang selalu ada disaat saya lagi putus asa, disaat saya pusing menghadapi perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Untuk Fahnurizan S.Sos beserta Istri dan kedua anaknya terimakasih telah memberikan bantuan dan saran serta supportnya didalam penyelesaian Skripsi ini.
13. Buat teman-teman Nugraha, Audi Septian Imar S.Ip, Didi, Edjank Akbar S.Sos, Adan, Mohd Fitriansyah S.Ip, Wilky, Bang Dayat, serta teman-teman kost lainnya.

Demikianlah ucapan terima kasih saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 15 Mei 2013

Penulis

IRIL PAHMI

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### ABSTRAK

DAFTAR ISI.....	i
-----------------	---

DAFTAR TABEL .....	iv
--------------------	----

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	7

### BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.2 Kebijakan .....	12
2.3 Kemiskinan .....	17
2.4 Program-program Pengentasan Kemiskinan.....	19
2.5 Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni .....	22
2.6 Definisi Konsep.....	31
2.7 Hipotesis.....	33

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Tempat Penelitian.....	34
3.2 Populasi dan Sampel .....	34
3.2.1 Populasi .....	34

3.2.2 Sampel.....	34
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	35
3.3.1 Data Primer .....	35
3.2.2 Data Sekunder .....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Teknik Analisa Data.....	37

#### **BAB IV      GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

4.1 Kondisi Umum Daerah Kabupaten Karimun Masa Kini.....	39
4.1.1 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan .....	42
4.1.1.1 Pembangunan Ekonomi Daerah .....	42
4.1.1.2 Pembangunan Sosial Budaya Daerah.....	42
4.1.1.3 Pembangunan Politik Daerah .....	43
4.1.1.4 Pembangunan Trantibmas/ Kantibmas .....	43
4.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karimun.....	43
4.2.1 Tugas dan Fungsi .....	43
4.2.1.1 Tugas .....	43
4.2.1.2 Fungsi.....	44
4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Karimun .....	44
4.3.1 Visi .....	44
4.3.2 Misi .....	45

4.3.3 Tujuan .....	47
4.3.4 Sasaran .....	50
4.3.5 Struktur Organisasi .....	51
<b>BAB V</b>	<b>IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN</b>
	<b>KEMISKINAN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011</b>
5.1 Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Karimun .....	66
5.1.1 Keluaran Kebijakan.....	70
5.1.2 Kepatuhan Kelompok Sasaran .....	90
5.1.3 Dampak Nyata Kebijakan .....	97
5.1.3.1 Kondisi Rumah Setelah Mendapat RTLH .....	99
5.1.3.2 Meningkatkan Kesejahteraan Penerima RTLH.....	101
5.1.4 Persepsi Terhadap Dampak.....	108
5.2 Kendala Dalam Pelaksanaan RTLH di Kabupaten Karimun .....	114
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>
6.1 Kesimpulan .....	120
6.2 Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>
<b>Lampiran</b>	



## **LIST OF APPENDIX**

Appendix I : The Classroom Observation Checklist of Oral Communicative Activities used by English Teacher of The Second Year at SMA ASShofa Pekanbaru. (March, 29 <sup>th</sup> 2012) .....	79
Appendix II : The Classroom Observation Checklist of Oral Communicative Activities used by English Teacher of The Second Year at SMA ASShofa Pekanbaru. (April, 11 <sup>th</sup> 2012) .....	82
Appendix III : The Classroom Observation Checklist of Oral Communicative Activities used by English Teacher of The Second Year at SMA ASShofa Pekanbaru. (April, 12 <sup>th</sup> 2012) .....	85
Appendix IV : The Classroom Observation Checklist of Oral Communicative Activities used by English Teacher of The Second Year at SMA ASShofa Pekanbaru (May, 10 <sup>th</sup> 2012) .....	88
Appendix V : Interview The Strategies Used by The English Teacher In Oral Communicative Activities.....	91



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Rehabilitasi RTLH di Kabupaten Karimun 2011.....	4
Tabel 4.1	Rekapitulasi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2011 .....	65
Tabel 5.1	Kondisi Kemiskinan Kabupaten Karimun .....	67
Tabel 5.2	Tanggapan Masyarakat Mengenai Pemerintah Kabupaten Karimun Telah Menetapkan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial RTLH untuk Mempermudah Pelaksanaan Program Tersebut.....	86
Tabel 5.3	Tanggapan Masyarakat Mengenai Kebijakan yang Dikeluarkan Telah Memenuhi Kebutuhan Masyarakat untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Melalui Program RTLH .....	87
Tabel 5.4	Tanggapan Masyarakat Mengenai Kebijakan yang Dikeluarkan Telah Mengatur Seluruh Prosedur Dalam Pelaksanaan Bantuan RTLH .....	88
Tabel 5.5	Rekapitulasi Jawaban Responden dari Indikator Keluaran Kebijakan .....	88
Tabel 5.6	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Perbup Karimun No.5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan RTLH di Kabupaten Karimun Tahun 2011 .....	94

Tabel 5.7 Tanggapan Responden Terhadap Ketepatan Waktu dalam Proses Pembangunan RTLH Berdasarkan Perbup No.5 Tahun 2011 .....	95
Tabel 5.8 Tanggapan Responden Mengenai Pencairan Dana Bantuan RTLH Sesuai Dengan Perbup No.5 Tahun 2011 .....	95
Tabel 5.9 Rekapitulasi Jawaban Responden Dari Indikator Kepatuhan Kelompok Sasaran .....	96
Tabel 5.10 Tanggapan Masyarakat Mengenai Hasil Pembangunan dari Program RTLH Telah Memenuhi Kriteria Rumah Layak Huni .....	103
Tabel 5.11 Tanggapan Masyarakat Mengenai Penerima Bantuan Sosial dari Program RTLH Telah Tepat Sasaran.....	104
Tabel 5.12 Tanggapan Masyarakat Mengenai Bantuan Dana yang Diberikan untuk Melaksanakan Program RTLH Digunakan Sesuai Dengan Ketentuan .....	105
Tabel 5.13 Rekapitulasi Jawaban Responden Dari Indikator Dampak Nyata Kebijakan.....	106
Tabel 5.14 Tanggapan Masyarakat Mengenai Dengan Ditetapkannya Kebijakan Bantuan Sosial Dari Program RTLH Sangat Membantu Masyarakat.....	111
Tabel 5.15 Tanggapan Masyarakat Mengenai Kepuasan Masyarakat Dengan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Bantuan Sosial RTLH .....	111

Tabel 5.16	Tanggapan Masyarakat Mengenai Kebijakan yang Dikeluarkan Tidak Mempersulit Masyarakat Untuk Mendapatkan Bantuan Sosial RTLH .....	112
Tabel 5.17	Rekapitulasi Jawaban Responden Dari Indikator Persepsi Terhadap Dampak .....	113

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru kita lihat dan kita dengar, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara tetangga maupun di Asia. Berbagai macam program telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan di negara ini, namun hal ini sepertinya tidak kunjung berkesudahan. Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian negara Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Edi Suharto (2009:16) mengungkapkan pengertian kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, baik maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Masalah kemiskinan lebih cenderung merupakan suatu masalah kebijakan politik yang berkaitan dengan masalah kebijakan pembangunan pada umumnya (di segala bidang), baik di level atas maupun di level bawah. Dalam hal kebijakan pembangunan, tampak jelas lemahnya atau ketidakberdayaan posisi masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin atau lapis bawah dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Adapun program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu salah satunya melalui program bantuan perumahan terhadap masyarakat miskin. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan papannya, karena kemiskinan pada umumnya membuat masyarakat hanya memenuhi kebutuhan pangan dan sandang.

Perlu adanya peran yang serius dari pemerintah dalam menangani angka kemiskinan ini, melalui program bantuan rumah tidak layak huni ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni sebagaimana mestinya. Kebutuhan akan rumah merupakan salah satu kebutuhan manusia setelah pangan dan sandang. Setiap individu manusia pada dasarnya akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasarnya dari pada kebutuhan sekundernya. Begitu pula kebutuhan akan rumah, setiap orang akan berusaha memenuhi kebutuhan rumah dalam setiap tingkat kehidupan masyarakat dengan memperhatikan selera dan kemampuan yang dimilikinya.

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni,

sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pemerintah telah memberlakukan berbagai kebijakan guna mengatasi masalah kemiskinan, salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan memberlakukan upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH). Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan elemen lainnya. Untuk memperbaiki RTLH tersebut, Pemerintah mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) yang dipadukan dengan pembuatan Sarana dan Prasarana Lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum.



Demikian halnya dengan pelaksanaan RTLH di Kabupaten Karimun, dimana masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang harus diberikan bantuan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut, berikut data masyarakat yang diajukan untuk memperoleh bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni:

**Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan Rehabilitasi RTLH di Kabupaten Karimun 2011**

No	Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan	Jumlah Kelompok	Alokasi Dana
1	Karimun	35	4	Rp. 700.000.000,-
2	Meral	21	3	Rp. 420.000.000,-
3	Tebing	-	-	-
4	Kundur	157	19	Rp. 3.140.000.000,-
5	Kundur Utara	215	27	Rp. 4.300.000.000,-
6	Kundur Barat	95	10	Rp. 1.900.000.000,-
7	Buru	77	9	Rp. 1.540.000.000,-
8	Moro	-	-	-
9	Durai	-	-	-
Jumlah		600 Kepala Keluarga		Rp.12.000.000.000

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karimun 2011*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa alokasi bantuan terbesar yaitu pada Kecamatan Kundur Utara yaitu sebanyak 215 kepala keluarga atau sekitar 27 kelompok penerima bantuan, dengan jumlah dana bantuan sebesar Rp. 4.300.000.000,- hal ini dikarenakan kecamatan Kundur Utara memiliki jumlah penduduk yang lebih padat dibandingkan dengan kecamatan lain. Selain itu kondisi ekonomi masyarakat kecamatan Kundur Utara yang masih tergolong rendah menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah pengalokasian bantuan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut.

Meskipun kebijakan mengenai program Rehabilitasi Sosial RTLH tersebut telah berjalan sejak awal tahun 2011 akan tetapi masih banyak permasalahan yang sering muncul di lapangan, permasalahan pelaksanaan program RTLH yang sering terjadi di lapangan tersebut meliputi:

1. Kurangnya sosialisasi secara formal kepada masyarakat tentang program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, yang ditandai dengan ketidaktahuan masyarakat akan berlakunya kebijakan tersebut, berikut kutipan wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat,

*“ Saya belum mengetahui pasti tentang pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial RTLH tersebut, bahkan tidak tahu siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut” (Wawancara dengan Bapak Ismail, Oktober 2011)”*

2. Dalam proses pencairan dana bantuan tersebut banyak ditemukan adanya indikasi penyelewengan dana bantuan oleh aparat yang mengurus, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparat di salah satu kecamatan di kabupaten karimun, (<http://batam.tribunnews.com> di akses pada tanggal 14 Juli 2012)

3. Bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, hal ini ditandai dengan pernyataan Anggota Komisi A DPRD Karimun.

*“Padahal Pemerintah sengaja mengalokasikan anggaran tersebut untuk warga kurang mampu. Faktanya dilapangan mereka yang mendapatkan bantuan rumah kebanyakan adalah warga mampu dari segi ekonomi. Sementara sangat jelas bahwa masih banyak warga kita yang berada bawah*

*garis kemiskinan malah tak dapat. Ini kan tidak masuk akal, " ujar Zulfikar, Anggota Komisi A DPRD Karimun, kepada wartawan, Senin (31/11) kemarin. (Sumber : <http://detifcom.blogspot.com> diakses pada tanggal 14 Juli 2012).*

Dari ketiga permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “ **Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Program RTLH 2011 di Kabupaten Karimun).**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi program pengentasan kemiskinan RTLH 2011 di Kabupaten Karimun.
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan RTLH 2011.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi program pengentasan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni 2011 di Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan khususnya program rumah tidak layak huni di Kabupaten Karimun Tahun 2011.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi dan untuk menambah wawasan terutama bagi diri peneliti sendiri.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang mendalami kajian-kajian yang sama yang berhubungan dengan keluarga miskin yang tentunya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagaimana pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Karimun.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 6 ( enam ) bab. Dimana masing-masing bab berhubungan dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai tentang latar belakang penelitian perumusan masalah,tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai dan mengemukakan beberapa konsep teoritis yang mendukung pemecahan masalah yang terdiri dari pengertian-pengertian yang dikutip pendapat-pendapat para ahli,hipotesis dan variabel penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi, aktivitas usaha serta daerah pemasaran.

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang diskriabel, pengujian hipotesis dan pembahasan tentang variabel gaya kepemimpinan, hubungan interpersonal, lingkungan kerja, gaji dan insentif.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian penulisan skripsi ini. Dimana akan diberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan serta mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi perusahaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Dalam oxford advance learner dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah put something into effect yang artinya adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak ( Susilo, 2007:174).

Merilee S. Grindle (Winarno 2012:149) mengatakan bahwa :“implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan”.

Dunn (2000:109) menyatakan bahwa:“pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain-lain”.

Ripley dan Franklin (Winarno, 2012 :148-149) berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu

jenis keluaran yang nyata (tangible output)”. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Solichin Abdul Wahab (2001:108), bahwa tahapan-tahapan dalam implementasi ditinjau dari :

a. Keluaran kebijakan (keputusan).

Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa.

b. Kepatuhan kelompok sasaran.

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Dampak nyata kebijakan.

Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang, kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebab-akibat) yang tinggi.

d. Persepsi terhadap dampak.

Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut.

Lebih jauh menurut mereka implementasi mencakup banyak macam kegiatan, yaitu :

- a. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapat sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan uang.
- b. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.
- c. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Maksudnya adalah badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau batasan-batasan tentang kegiatan yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.



Leester dan Stewart (dalam Winarno 2012:148) menjelaskan bahwa “Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Selanjutnya, Van Meter dan Horn (Winarno, 2012 : 149-150) membatasi implmentasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”. Maksudnya adalah tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan oleh keputusan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai pelaksanaan program tersebut.

Implementasi merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

## **2.2 Kebijakan**

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai tujuan dan

sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan publik, pernyataan tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan kedalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Jadi, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan kebijakan yang sama, dan mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Meter dan Horn (dalam Wibawa, 1994:20) merumuskan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun yang dilakukan kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan didalam kebijakan.

Dari definisi tersebut dapat diuraikan bahwa adanya upaya untuk mentransformasikan kegiatan operasional serta didalam mencapai perubahan – perubahan seperti yang dirumuskan dalam keputusan kebijaksanaan implementasi kebijakan merupakan proses lebih lanjut dari formulasi kebijakan.

Implementasi mencakup penciptaan policy delivery system, dimana sarana yang spesifik dirancang dan dilaksanakan dengan harapan dapat sampai pada tujuan akhir tertentu dengan demikian kebijakan diterjemahkan kedalam alokasi program yang diarahkan pada pencapaian tujuan akhir yang dinyatakan dalam kebijakan (Marlan Hutahean, 1997 : 21).

Dari pandangan-pandangan diatas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat menentukan didalam mencapai tujuan. Sekalipun tujuan kebijakan telah ditetapkan dengan baik, tidak ada kepastian bahwa kebijakan itu akan berhasil. Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang mengakumulasikan semua potensi yang ada bagi tercapainya tujuan.

Analisis kebijaksanaan adalah suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, kenapa mereka melakukan hal itu dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda – beda.

Sedangkan menurut Thomas R.Dye (Wahab Solichin Abdul 1990 : 2) “semua definisi analisis kebijaksanaan pada akhirnya akan bermuara pada hal yang sama yakni penggambaran dan penjelasan mengenai sebab – sebab dan akibat – akibat dari tindakan atau perbuatan pemerintah”.

Menurut Friedrich Carl (dalam Irfan Islami, 1991: 17) definisi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau perintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menunjukkan hambatan – hambatan dan kesempatan – kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan – tujuan tertentu.

Sedangkan James R.S Anderson (dalam Irfan Islami, 1991: 18) merumuskan kebijakan sebagai pelaku dari sejumlah actor ( pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Miftah Thoha (1984:45) kebijakan atau policy adalah sikap atau tindakan lebih lanjut tentang bagaimana caranya mencapai tujuan dalam hal

tindakan ada ketentuan yang mengaturnya, mendasarkan kembali kepada asas pokok penyelenggaraan pemerintah..

Sementara itu, implementasi yang berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun ingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tanpa diduga tiba – tiba terjadi pergantian kekuasaan, datangnya bencana alam dan lain sebagainya) kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Study terhadap implementasi kebijakan berkaitan erat dengan suatu kenyataan yang semakin bertumbuh kembang bahwa banyak kebijakan yang mengalami kegagalan ditingkat implementasi. Terhadap variasi pandangan dari ahli menyangkut faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Menurut J. A. M. Mares dan Sunggono (1994) mengatakan bahwa ada beberapa factor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijaksanaan yaitu :

a. Isi Kebijaksanaan

Kebijaksanaan dikatakan gagal karena masih samanya isi dan tujuan kebijaksanaan, tidak memiliki ketetapan dan ketidaktegasan dalam bentuk intern ataupun ekstern dari kebijaksanaan itu sendiri

b. Sosialisasi

Terjadinya kekurangan informasi, maka dengan mudanya mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik terhadap objek kebijaksanaan

ataupun kepada para pelaksana dari isi kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dan hasil – hasil dari kebijaksanaan itu. Kurangnya persebaran sosialisasi mengenai program RTLH, mengakibatkan informasi yang diterima masyarakat terbatas dan tidak adanya keseragaman pemahaman antar masyarakat tersebut terkait dengan pelaksanaan program tersebut.

Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan program RTLH untuk penanggulangan kemiskinan. Tanpa sosialisasi yang baik dan menyeluruh, besar kemungkinan timbul masalah dalam pelaksanaan program seperti salah sasaran dan lain sebagainya.

c. Dukungan

Didalam kebijaksanaan akan sangat sulit didalam pelaksanaannya jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijaksanaan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Dalam pembagian potensi antara para actor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang. Sedangkan George Edwards III (Marlan Hutahean, 1997 : 25) mengemukakan 2 premis untuk keperluan study implementasi kebijakan yaitu prakondisi – prakondisi apakah yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan serta hambatan – hambatan apa yang dihadapi dalam penerapannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut ia kemudian mengidentifikasi factor – factor yang dianggap mempengaruhi proses

implementasi kebijakan adalah (1) Faktor Komunikasi, (2) Faktor sumberdaya, (3) Faktor disposisi atau watak pelaksana (4) Faktor struktur birokrasi, pandangan Meter dan Horn dalam (Wibawa 1994) menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijakan sebelumnya, tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana yang telah disepakati. Studi implementasi program lebih menekankan pada pengujian factor – factor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian sasaran kebijaksanaan.

### **2.3 Kemiskinan**

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya program RTLH adalah membantu masyarakat miskin agar dapat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi oleh karena itu yang menjadi sasaran program adalah keluarga atau rumah tangga miskin.

Menurut I.L Pasaribu dan B. Simadjuntak (1982) kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok.

Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi terdiri dari komposisi pangan bernilai gizi cukup, keperluan air bersih, tingkat pendidikan,

tingkat kesehatan dan yang terutama tempat tinggal. Garis kemiskinan yang ditentukan oleh batas-batas minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok biasanya dipengaruhi oleh :

- a. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan
- b. Posisi manusia dalam lingkungan sekitarnya
- c. Kebutuhan obyektif manusia biasa hidup secara manusiawi

Secara garis besar kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 dimensi yaitu kemiskinan ekonomi, kemiskinan sosial dan kemiskinan politik. Ketiga dimensi kemiskinan ini walaupun secara teoritis dapat dibedakan namun dalam kenyataannya satu sama lain saling mempengaruhi. Kemiskinan secara singkat dapat dirumuskan sebagai suatu standart hidup yang rendah ,yaitu masih adanya kekurangan dibidang materi pada sejumlah golongan orang atau masyarakat ( Putro S.T 1995:9).

Kemiskinan sosial adalah suatu kondisi masyarakat yang masih kekurangan jaringan sosial yang dapat mendukung gerak langkah atau mobilitas untuk mendapat kesempatan bagi pengembangan diri sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya. Sedangkan kemiskinan politik adalah menuju pada derajat akses terhadap kekuatan yang dapat menentukan alokasi sumber daya secara baik dan dibina misalnya disbanding dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat. Kehidupan standar yang rendah itu secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan dasar harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. (Putro S.T 1995:11).

Sasarannya adalah terdata seluruh keluarga atau rumah tangga miskin diseluruh wilayah Kabupaten Karimun pada setiap satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil seperti rukun tetangga (RT) maupun keluarga atau rumah tangga miskin yang ada sesuai dengan kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan.

## **2.4 Program-Program Pengentasan Kemiskinan**

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun program- program pemerintah yang telah berlangsung dan telah di terapkan di seluruh sektor Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Daerah /Kota mengenai pengentasan kemiskinan yaitu:

- a. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I
  1. Program Keluarga Harapan (PKH).
  2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
  3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
  4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).



5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN).
- b. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II.
  1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
    - a. PNPM Mandiri Perdesaan.
    - b. PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias).
    - c. PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative).
    - d. PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas.
    - e. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP).
    - f. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP).
    - g. PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua.
    - h. PNPM Mandiri Perkotaan.
    - i. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan.
    - j. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
    - k. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
    - l. PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK).
    - m. PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP).
    - n. PNPM-Mandiri Pariwisata.

o. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim).

2. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif.

c. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III.

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500 juta. Agunan pokok KUR adalah proyek/usaha yang dibiayai, namun Pemerintah membantu menanggung melalui program penjaminan hingga maksimal 70% dari plafon kredit.

Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

2. Kredit Usaha Bersama (KUBE).

KUBE adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan: meningkatnya pendapatan keluarga; meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan; Meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya; Meningkatnya kemampuan

anggota KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif (orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; Keluarga Miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan

### 3. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH).

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan bantuan pemerintah dalam rehabilitasi rumah yang tidak layak huni. Tujuan dari bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini adalah untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu agar dapat memiliki hunian atau tempat tinggal yang layak.

## **2.5 Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah

satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Untuk memperbaiki RTLH tersebut, Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) yang dipadukan dengan pembuatan Sarana dan Prasarana Lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum.

#### A. Kriteria Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS-RTLH

1. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku.

2. Kepala keluarga / anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin.
4. Tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati.
5. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan /desa atas status tanah.
6. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut :
  - a. Tidak permanen dan / atau rusak.
  - b. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, seperti : papan, ilalang, bamboo yang dianyam/gedeg, dsb.
  - c. Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya.
  - d. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak.
  - e. Diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci dan kakus.

#### B. Kriteria Sarana dan Prasarana Lingkungan

Sarana prasarana lingkungan yang menjadi sasaran kegiatan adalah :

1. Terletak pada lokasi RS-RTLH.
2. Merupakan fasilitas umum yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama warga miskin.
3. Menjadi kebutuhan dan diusulkan oleh masyarakat.
4. Legal dan tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial.
5. Masyarakat setempat bersedia untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki seperti : lahan, tenaga dan material.

#### C. Kelompok Penerima Bantuan

- a. Kepala Keluarga penerima bantuan dengan difasilitasi oleh Dinas Sosial Kab/Kota membentuk kelompok dengan anggota berjumlah 5 sampai dengan 10 KK. Tugas kelompok adalah :
  1. Membentuk pengurus kelompok terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
  2. Membuka rekening di Bank Pemerintah atas nama kelompok dengan specimen ditanda tangani ketua dan bendahara.
  3. Melakukan penilaian bagian rumah yang akan direhabilitasi.
  4. Menetapkan toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang.
  5. Mengusulkan pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (tukang).
  6. Mengajukan usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang diperlukan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- setiap rumah untuk disetujui oleh Dinas Sosial Kab/Kota.
  7. Membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam satu kelompok.

8. Setelah uang diterima, ketua membuat dan menandatangani tanda terima uang bantuan dari Kementerian Sosial sejumlah yang tercantum dalam rekening dengan diketahui aparat desa/kelurahan setempat dan segera dikirim ke Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Dinas Sosial Kab/Kota.
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan RS-RTLH kepada Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Dinas Sosial Kab/Kota tembusan disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran dan surat pernyataan telah diselesaikannya pekerjaan yang diketahui kepala desa/lurah.

#### D. Tim Pembangunan Sarling

1. Menyusun pengurus Tim Sarling yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
2. Membuka rekening di bank pemerintah atas nama kelompok dengan specimen ditandatangani ketua dan bendahara.
3. Menentukan jenis Sarling yang akan dibangun sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber local.
5. Menggerakkan masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi.
6. Menunjuk tenaga ahli (tukang).
7. Melaksanakan pembangunan Sarling secara bergotong-royong.
8. Setelah uang diterima, ketua membuat dan menandatangani tanda terima uang bantuan dari Kementerian Sosial sejumlah yang tercantum dalam rekening

dengan diketahui aparat desa/kelurahan setempat dan segera dikirim ke Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Dinas Sosial Kab/Kota.

9. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan dan kegiatan Sarling kepada Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Dinas Sosial Kab/Kota tembusan disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi, dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran dan surat pernyataan selesainya pekerjaan yang diketahui kepala desa/lurah.

#### E. Masyarakat

1. Mengalokasikan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk keberhasilan kegiatan.
2. Bersama kelompok dan Tim Pembangunan Sarling melaksanakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan.

#### F. Prosedur Pengusulan Kegiatan

Prosedur pengusulan penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kab/Kota bersama TKSK/PSM/Karang Taruna/Orsos/Aparat desa/Kelurahan melakukan pendataan KK calon penerima RTLH.
2. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, Dinas Sosial/Instansi Kab/Kota mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ke Kementerian Sosial dengan rekomendasi Dinas Sosial Provinsi dengan melampirkan data lokasi, data calon penerima (by name by address) dan foto rumah.



3. Ditjen Pemberdayaan Sosial cq Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.
4. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan Ditjen Pemberdayaan Sosial mengeluarkan SK Penerapan KK penerima bantuan RS-RTLH dan alokasi Sarling.
5. Nama penerima bantuan yang sudah ditetapkan dalam SK Dirjen Pemberdayaan Sosial tidak dapat diganti.

#### G. Pelaksanaan Kegiatan

##### 1. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dan Sarling adalah :

- a. Swakelola; Baik secara individu maupun kelompok sesuai pasal 39 dan lampiran I Bab III Keppres No.80 tahun 2003.
- b. Kesetiakawanan; Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang.
- c. Keadilan; Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
- d. Kemanfaatan; Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
- e. Keterpaduan; Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- f. Kemitraan; Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.

- g. Keterbukaan Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan RS-RTLH.
- h. Akuntabilitas; Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- i. Partisipasi; Pelaksanaan RS-RTLH dan Sarling dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya.
- j. Profesional; Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan /konsep yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- k. Keberlanjutan; Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian

## 2. Tahapan Pelaksanaan Bantuan

- a. Verifikasi proposal RS-RTLH dan Sarling.
- b. Penjajagan calon lokasi kegiatan, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan daerah dan masyarakat, kelayakan calon penerima bantuan dan faktor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan.
- c. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesamaan pemahaman dan gerak langkah setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dan Sarling.

Sasaran kegiatan sosialisasi mencakup :

- 1) Dinas/Instansi Sosial Provinsi.
  - 2) Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
  - 3) Unsur Masyarakat.
  - 4) Pendamping (TKSK).
- d. Membangun dan mengembangkan komitmen untuk menyepakati berbagai sumber daya yang dapat dan akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program.
- e. Penentuan lokasi dan calon penerima.
- f. Verifikasi Calon Penerima Bantuan.
- g. Pelaksanaan pembangunan RS-RTLH dan Sarling :
- 1) Melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki.
  - 2) Menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya.
  - 3) Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya.
  - 4) Melaksanakan pembelian bahan bangunan.

- 5) Melaksanakan kegiatan perbaikan rumah dan pembangunan Sarling.
- 6) Pelaksanaan pembangunan RS-RTLH dan Sarling telah selesai selambat-lambatnya 100 hari setelah dana masuk ke rekening kelompok.

### 3. Pelaporan

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Sosial Kab/Kota kepada Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, mencakup :

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana operasional dan Sarling masing-masing Kab/Kota selambat-lambatnya akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban keuangan bantuan RS-RTLH masing-masing kelompok dan Sarling setelah selesai pelaksanaan pekerjaan.

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto rumah dan Sarling dalam kondisi sebelum, proses dan hasil akhir kegiatan dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan untuk kelompok, disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah pekerjaan selesai.

### **2.6 Definisi Konsep**

Untuk mempermudah analisa agar mendapatkan kesatuan pengertian dalam penelitian, maka penulis memberikan definisi konsep sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

### 2. Kebijakan

Adalah sikap atau tindakan lebih lanjut tentang bagaimana caranya mencapai tujuan yaitu dalam hal program pengentasan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.5 Tahun 2011.

### 3. Indikator Penelitian

Berdasarkan pendapat Solchin Abdul Wahab (2001:108) :

#### a. Keluaran Kebijakan

Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu dalam program rumah tidak layak huni.

#### b. Kepatuhan Kelompok Sasaran

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.

#### c. Dampak nyata kebijakan

Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini

berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang, serta kepatuhan kelompok sasaran yang tinggi dalam penerapan program pengentasan kemiskinan khususnya dalam program rumah tidak layak huni.

d. Persepsi terhadap dampak.

Yaitu penilaian masyarakat terhadap dampak nyata pelaksanaan program rumah tidak layak huni yang dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan program rumah tidak layak huni tersebut.

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **3.1 Lokasi dan Tempat Penelitian**

Adapun lokasi dan tempat penelitian ini bertempat di wilayah Kabupaten Karimun, pada tahun 2012.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono: 2009).

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat atau kepala keluarga yang mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan bantuan Rehabilitasi RTLH yaitu sebanyak 600 kepala keluarga se Kabupaten Karimun.

##### **3.2.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample dengan metode “*Simple Random Sampling*” (Sampel Acak Sederhana) Menurut Teori Sugiono yaitu pengambilan sample yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Apabila besar sampel yang diinginkan itu berbeda-beda, maka besarnya kesempatan tiap satuan elementer untuk terpilihpun berbeda-

beda. Jumlah sampel dalam penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan rumus Slovin (dalam Umar, 2004:146) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{600}{1 + 600(10\%)^2}$$

$$n = \frac{600}{1 + 600(0.01)}$$

$$n = \frac{600}{7}$$

$$n = 85,71$$

$$n = 86$$

Keterangan :  $n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = Error 10% (Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel).

Jadi, dari hitungan jumlah populasi dari masyarakat sebanyak 600 Orang, dengan kelonggaran 10%, maka hasil penghitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 85,71 yang dibulatkan menjadi 86 orang.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh melalui responden penelitian yang merupakan sumber informasi utama memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan



penelitian dari *questioner* (Angket) dan *interview* (wawancara) yang peneliti berikan kepada responden.

### **3.3.2 Data Skunder**

Yaitu data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Karimun serta data-data penunjang dari wilayah yang menjadi objek pelaksanaan perogram RTLH tersebut berupa :

1. Struktur organisasi.
2. Gambaran umum lokasi penelitian.
3. Serta data-data yang lain yang dianggap perlu.
4. Petunjuk teknis pelaksanaan RTLH di Kabupaten Karimun.
5. Undang-undang atau peraturan daerah yang mengatur hal pelaksanaan RTLH tersebut.
6. Jumlah tingkat kemiskinan di Kabupaten Karimun.
7. Data program pengentasan kemiskinan Tahun 2011 di Kabupaten Karimun.
8. Data jumlah masyarakat yang layak mendapatkan RTLH di Kabupaten Karimun.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung atau peninjauan langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Yaitu melakukan *interview* atau tanya jawab kepada *key informan* (Informan Kunci) yang mengetahui pasti masalah pelaksanaan program pengentasan kemiskinan RTLH di wilayah Kabupaten Karimun. Dikemukakan oleh Arikunto, wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara ini berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah peneliti susun sedemikian rupa. Alat pengumpulan datanya adalah pedoman wawancara ( Arikunto, 2006: 155 ).

3. *Questioner* (Angket)

Yaitu dengan membuat dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden penelitian tentang pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karimun.

### **3.5 Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa data Deskriptif Analisis, yaitu dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap data-data serta masalah yang terjadi di lapangan,

kemudian data-data tersebut di kaitkan dengan teori-teori yang ada serta dianalisa dan diberikan penjelasan secara jelas.

## **BAB IV**

### **Gambaran Umum Kondisi Daerah**

#### **Kabupaten Karimun**

##### **4.1. Kondisi Umum Daerah Kabupaten Karimun Masa Kini**

Berdasarkan sumber dari Rencana Strategis (RenStra) Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Kabupaten Karimun merupakan bagian daerah dari Provinsi Kepulauan Riau dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999, memiliki luas wilayah 7.984 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 1.524 Km<sup>2</sup> dan luas lautan 6.400 Km<sup>2</sup> dan pada saat ini Kabupaten Karimun terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan yaitu : Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai.

Secara geografis Kabupaten Karimun terletak di bagian barat Provinsi Riau yang berbatasan sebelah Utara dengan Selat Singapura, Semenanjung Malaysia dan Selat Malaka; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir; sebelah Timur berbatasan dengan Kota Batam ; sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rangsang. Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis serta Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelelawan.

Sebagai daerah yang baru berkembang Kabupaten Karimun merupakan daerah yang sangat strategis, karena berdampingan langsung dengan dua negara yakni Malaysia dan Singapura. Akses pelayaran berbagai tujuan baik dalam

maupun luar negeri telah pula menjadikan Kabupaten Karimun sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di daerah Kepulauan Riau.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan yang semakin baik telah menjadikan Kabupaten Karimun sebagai daerah yang berpotensi bagi perkembangan sektor industri, perdagangan dan pariwisata. Hal ini merupakan daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk bagi penduduk daerah lain untuk datang ke Kabupaten Karimun, baik dengan tujuan bisnis, wisata, maupun untuk mencari pekerjaan, tentunya hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi dinamika kehidupan sosial masyarakat, karena dengan perkembangan sektor tersebut di atas dapat mendorong berkembangnya permasalahan-permasalahan sosial yang semakin kompleks, seperti masalah prostitusi yang semakin meningkat dari waktu-ke waktu, demikian pula dengan permasalahan sosial lain seperti gelandangan, pengemis, pengangguran, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, kriminalitas, narkoba dan lain-lain.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semula tidak dianggap sebagai masalah sosial sekarang dapat menjadi ancaman bagi disintegrasi sosial dan moral bangsa terutama perilaku generasi muda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya bangsa, Selain itu tingginya tingkat kesenjangan sosial, ekonomi masyarakat dapat pula menyebabkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya menimbulkan disintegrasi bangsa. Merebaknya bisnis *entertainment* diskotik, karaoke, nigt club, hotel, wisma, panti pijat, salon dan restoran merupakan salah satu pemicu makin berkembangnya

prostitusi dan perdagangan obat-obatan terlarang di Kabupaten Karimun, dimana tempat-tempat tersebut dijadikan tempat transaksi yang sangat potensial.

Untuk menangani permasalahan sosial dimaksud maka Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebagai institusi yang memiliki tugas pokok dan wewenang di bidang pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karimun akan berupaya sepenuhnya mendukung terciptanya ketertiban sosial dalam rangka terwujudnya Kesejahteraan Sosial masyarakat Kabupaten Karimun, melalui perencanaan dan program kerja di bidang sosial dengan memanfaatkan dan memperhatikan keanekaragaman potensi serta sumber-sumber kesejahteraan sosial yang ada. Untuk mencapai semua ini tentunya sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi sosial dari seluruh masyarakat Kabupaten Karimun itu sendiri.

Dinas Sosial sudah melaksanakan serangkaian tugas penyusunan rencana kerja sebagai wujud pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, diantaranya adalah :

- a. Penyusunan rencana kerja (RENJA) tahunan.
- b. Implementasi kegiatan sesuai persetujuan perencanaan kerja.
- c. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

#### **4.1.1 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan**

Gambaran umum kondisi daerah yang diproyeksikan Dinas Sosial Kabupaten Karimun ke depan akan disesuaikan dengan pembangunan rancangan Rencana Strategis Pembangunan Daerah. Adapun strategis pembangunan tersebut diantaranya :

##### **4.1.1.1. Pembangunan Ekonomi Daerah**

- a. Perencanaan pembangunan sosial ekonomi yang berdimensi kerakyatan dengan pola pembinaan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.
- b. Perencanaan pembangunan sosial ekonomi dengan memberdayakan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi daerah.
- c. keuangan bukan bank dalam kegiatan pembangunan ekonomi daerah.

##### **4.1.1.2. Pembangunan Sosial Budaya Daerah**

- a. Perencanaan pembangunan manusia dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang aktif, kreatif dan mandiri.
- b. Perencanaan pembangunan sosial dan budaya dengan mendorong kesadaran masyarakat akan potensi daerah sesuai dengan norma–norma kemanusiaan.

#### **4.1.1.3. Pembangunan Politik Daerah**

Perencanaan pembangunan politik daerah dengan menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah daerah dan social kultural yang berbatasan dengan wilayah lain (Malaysia dan Singapura) secara berdaulat, adil dan makmur.

#### **4.1.1.4. Pembangunan Trantibmas / Kamtibmas**

Perencanaan pembangunan ketentraman dan ketertiban Masyarakat dengan menciptakan situasi dan kondisi yang tertib dan kondusif sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat daerah di Kabupaten Karimun.

### **4.2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karimun**

#### **4.2.1. Tugas dan Fungsi**

Dinas Sosial Kabupaten Karimun dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2006 yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

##### **4.2.1.1. Tugas**

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial.



#### **4.2.1.2. Fungsi**

Dinas Sosial mempunyai fungsi melakukan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugas sosial; melakukan pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

### **4.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Karimun.**

#### **4.3.1. Visi**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang merupakan suatu harapan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dimasa mendatang, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi.

Visi Dinas Sosial Kabupaten Karimun yaitu :

**”Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

**Kabupaten Karimun yang Bermartabat”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa adanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diupayakan dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial dari jumlah penyandang masalah

kesejahteraan sosial maupun kompleksitasnya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

#### **4.3.2. Misi**

Misi merupakan suatu pernyataan tujuan organisasi yang harus dilaksanakan agar tujuan tersebut dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang sudah ditetapkan.

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dan memperjelas apa saja yang dilakukan.

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Karimun menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pemberdayaan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ).
2. Mengembangkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
3. Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat.
4. Melaksanakan Pelayanan Pemakaman.
5. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur yang berbasis Kesejahteraan Sosial.

Adapun penjelasan kelima makna misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**Misi Pertama :**

Meningkatkan Pemberdayaan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ). Maknanya adalah serangkaian usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, meningkatkan peran dan kinerja orsos/LSM dan organisasi profesi, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pendayagunaan sumber dana sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

**Misi Kedua :**

Mengembangkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Maknanya adalah serangkaian usaha dan kegiatan untuk meningkatkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dan Karang Taruna dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial.

**Misi Ketiga :**

Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat. Maknanya adalah serangkaian usaha dan kegiatan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

**Misi Keempat :**

Melaksanakan Pelayanan Pemakaman. Maknanya adalah serangkaian usaha dan kegiatan dalam pelayanan, penataan dan pengembangan pemakaman.

**Misi Kelima :**

Meningkatkan Profesionalisme Aparatur yang berbasis Kesejahteraan Sosial. Maknanya adalah serangkaian usaha dan kegiatan dalam pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga memiliki wawasan dan penunjang dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial.

**4.3.3. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dinas Sosial Kabupaten Karimun memiliki 16 (enam belas) tujuan yang mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam tatanan masyarakat.
2. Meningkatkan peran dan kinerja Organisasi Sosial (Orsos)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Terwujudnya Organisasi Profesi Pekerjaan Sosial yang mampu berperan sebagai mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan berkembangnya Pekerjaan Sosial sebagai profesi dasar pelaksanaan usaha pekerjaan sosial.
4. Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan dalam pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi nilai sosial budaya setempat.
5. Pendayagunaan sumber dana sosial sehingga terhimpunnya dan termanfatkannya dana sosial masyarakat untuk kepentingan sosial secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna.
6. Memberdayakan fakir miskin agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan dalam pembangunan.

7. Terpenuhinya kebutuhan kemampuan fisik dan psiko-sosial serta memulihkan kemampuan fisik dan mental, serta meningkatkan kemandirian anak.
8. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia dan melembaganya lanjut usia dalam kehidupan bangsa agar dapat menjali hari tuanya dalam suasana aman, tenteram dan sejahtera lahir dan batin.
9. Pemulihan harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta tumbuhnya kemauan dan berkemampuan melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya perbuatan tuna sosial dan dapat menerima serta membina bekas Tuna Sosial.
10. Terbina dan terentasnya penyandang cacat sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
11. Meningkatkan semangat pengabdian kualitas dan persebaran Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) serta berperan aktif dalam usaha kesejahteraan sosial.
12. Meningkatnya kualitas dan peran Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan dalam mencegah dan mengatasi masalah sosial dikalangan generasi muda.
13. Terwujudnya kondisi sosial masyarakat yang tanggap dalam upaya penanggulangan korban bencana alam / bencana sosial, terhindarnya

masyarakat dari ancaman bencana alam/social serta pulihnya kehidupan dan penghidupan korban bencana alam / bencana sosial.

14. Memindahkan / menyediakan lahan, menata dan mengembangkan pemakaman.

15. Terbinanya aparatur yang memiliki wawasan dan orientasi, serta visi dan misi yang jelas dan jauh ke depan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

16. Meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur.

#### **4.3.4. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran, Dinas Sosial Kabupaten Karimun tetap mengacu pada Sasaran dan Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

#### **4.3.5. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2008 dan Peraturan Bupati Karimun Nomor : 16 tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karimun yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2008, Dinas Sosial Kabupaten Karimun adalah instansi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dengan uraian sebagai berikut:

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang sosial;
- b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang sosial;
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
- d. Melaksanakan kegiatan lain di bidang sosial yang ditugaskan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.



- b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karimun terdiri dari :

1. Kepala

Dinas Sosial Kabupaten Karimun dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bagian sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

Uraian Tugas Bagian Sekretariat sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis administratif umum dan kepegawaian di lingkungan dinas.
- b. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum.
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian.

- d. Melaksanakan perencanaan dinas.
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan dinas.
- f. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- g. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas.
- h. Menyelenggarakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi, dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan mengelola administrasi kepegawaian serta tugas lain dibidang teknis administrasi dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas.
- b. Melaksanakan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi.

- c. Menyiapkan bahan, rencana dan pengusulan kenaikan pangkat dan gaji berkala.
- d. Menyiapkan bahan, rencana dan pengusulan penilaian prestasi kerja pegawai.
- e. Menyiapkan bahan, rencana dan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- f. Menyiapkan bahan, rencana dan pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai.
- g. Menyiapkan bahan pencatatan prestasi, pelanggaran, kedisiplinan dan kasus–kasus pegawai dinas.
- h. Memberikan masukan dan koordinasi dengan bagian kepegawaian dalam hal pengembangan karir pegawai.
- i. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan pimpinan.
- Sub Bagian Pencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan perumusan perencanaan, pelaksanaan rencana anggaran belanja, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan mengurus perbendaharaan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan kebijakan perencanaan di lingkungan Dinas yang menjadi kewenangan Dinas.

- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang perumusan perencanaan Dinas.
- c. Melakukan pengelolaan anggaran keuangan Dinas.
- d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain menunjang pelaksanaan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan Dinas.
- e. Menyiapkan bahan, rencana bahan dan pengusulan anggaran.
- f. Melaksanakan pengelolaan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan pengurusan perbendaharaan keuangan.
- g. Pelaporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan teknis operasional Pemberdayaan Sosial yang menjadi kewenangan daerah.

Uraian Tugas Bidang Pemberdayaan Sosial :

- a. Melakukan perencanaan umum pemberdayaan sosial.
- b. Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial.
- c. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial.

- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial.
- e. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Partisipasi Sosial.
- b. Seksi Pemberdayaan dan Penggalangan Dana Sosial.

Seksi Partisipasi Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional dalam upaya melaksanakan partisipasi sosial.

Uraian Tugas Seksi Partisipasi Sosial :

- a. Merencanakan strategi pelaksanaan sarana partisipasi sosial;
- b. Merencanakan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional partisipasi sosial.
- c. Melaksanakan sarana partisipasi sosial.
- d. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan partisipasi sosial.
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan partisipasi sosial.
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Seksi Pemberdayaan dan Penggalangan Dana Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional dalam upaya Pemberdayaan dan Penggalangan Dana Sosial.

Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Penggalangan Dana Sosial :

- a. Merencanakan strategi pelaksanaan pemberdayaan dan penggalangan dana sosial;
- b. Merencanakan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional pemberdayaan dan penggalangan dana sosial.
- c. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pemberdayaan dan penggalangan sosial.
- d. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

#### 4. Bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan perencanaan umum dan petunjuk teknis operasional Kesejahteraan Sosial yang menjadi kewenangan daerah.

Uraian Tugas Bidang Kesejahteraan Sosial :

- a. Melakukan perencanaan umum kesejahteraan sosial.
- b. Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kesejahteraan sosial.

- c. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesejahteraan sosial;
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan kesejahteraan sosial.
- e. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial.
- b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial.

Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional dalam upaya melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

Uraian Tugas Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial :

- a. Merencanakan rencana strategi pelaksanaan pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial.
- b. Merencanakan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional Usaha Kesejahteraan Sosial.
- c. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial.
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengembangan Kesejahteraan Sosial.

- e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan pengadaan, penataan, pembinaan dan Bimbingan dan Penyuluhan Sosial.

Uraian Tugas Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial :

- a. Merencanakan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis bimbingan dan penyuluhan sosial.
- b. Merencanakan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional pengadaan dan penataan bimbingan dan kesejahteraan sosial.
- c. Mempersiapkan bahan untuk melaksanakan pengadaan dan penataan bimbingan dan kesejahteraan sosial.
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penataan, pengadaan, pembinaan dan bimbingan dan kesejahteraan sosial.
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.



## 5. Bidang Pelayanan Sosial

Bidang Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, pelaporan kebijakan dan petunjuk teknis penataan, pembinaan dan pengembangan Pelayanan Sosial yang menjadi kewenangan daerah.

Uraian Tugas Bidang Pelayanan Sosial :

- a. Melakukan perencanaan strategis dalam rangka pengembangan pelayanan sosial.
- b. Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan sosial.
- c. Melaksanakan penataan pelayanan sosial.
- d. Melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelayanan sosial.
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan sosial.
- f. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bidang Pelayanan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- b. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pengembangan Rehabilitasi Sosial.

Uraian Tugas Seksi Rehabilitasi Sosial :

- a. Merencanakan penyusunan teknis operasional pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan rehabilitasi sosial.
- b. Melaksanakan penataan, pembinaan dan pengembangan rehabilitasi sosial.
- c. Melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan penataan dan pengembangan rehabilitasi sosial.
- d. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pengembangan rehabilitasi sosial.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan rehabilitasi sosial.
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Pelayanan Sosial.

Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pengembangan pembinaan Bantuan dan Perlindungan Sosial yang menjadi kewenangan daerah;

Uraian Tugas Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial :

- a. Merencanakan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan penataan, pembinaan bantuan dan perlindungan sosial.
- b. Melaksanakan penataan, bantuan dan perlindungan sosial.
- c. Melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan penataan dan pembinaan bantuan dan perlindungan sosial.
- d. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pembinaan bantuan dan perlindungan sosial.
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan bantuan dan perlindungan sosial.
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Pelayanan Sosial.

6. Bidang Pemakaman

Bidang pemakaman mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan perencanaan pelaporan umum dan petunjuk teknis operasional yang menyangkut pelaksanaan pemakaman yang menjadi kewenangan daerah.

Uraian Tugas Bidang Pemakaman :

- a. Melakukan perencanaan umum dan pelaporan dalam rangka penataan, pembinaan dan pengembangan pemakaman.
- b. Melaksanakan penataan, pembinaan dan pengembangan pemakaman.
- c. Melakukan persiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan pemakaman.
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan pemakaman.
- e. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bidang Pemakaman Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Pemakaman.
- b. Seksi Penataan dan Pengembangan Pemakaman.

Seksi Pelayanan Pemakaman mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis operasional pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan pemakaman.

Uraian Tugas Seksi Pelayanan Pemakaman :

- a. Melakukan perencanaan umum dan pelaporan dalam rangka penataan, pembinaan dan pengembangan pelayanan pemakaman.

- b. Melaksanakan pelayanan perizinan makam.
- c. Melakukan tertib pemakaman.
- d. Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pemakaman.
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan pelayanan pemakaman.
- f. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Pemakaman.

Seksi Penataan dan Pengembangan Pemakaman mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan operasional penataan dan pengembangan pemakaman.

Uraian Tugas Seksi Penataan dan Pengembangan Pemakaman :

- a. Merencanakan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan penatan dan pengembangan pemakaman.
- b. Melaksanakan penataan dan pengembangan makam.
- c. Melakukan persiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penataan dan pengembangan makam.
- d. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Pemakaman.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun perlu didukung oleh personil yang profesional, handal dan dengan SDM yang berkualitas. Pada saat ini personil yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebanyak 30orang, yang terdiri dari 24 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 6 orang Pegawai Honorer, dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 4.1. Rekapitulasi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karimun  
Tahun 2011**

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>PNS (Org)</b>	<b>Honorer (Org)</b>
1.	Pasca Sarjana	5	-
2.	Sarjana	10	1
3.	Sarjana Muda/Diploma III	2	-
4.	D II	-	-
5	D I	-	-
6.	SLTA	6	5
7.	SLTP	1	-
8.	SD	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>6</b>

## **BAB V**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**

#### **DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011**

##### **5.1. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kabupaten Karimun.**

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan dan keadilan, sehingga penanggulangan kemiskinan diperlukan dalam rangka memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berkaitan dengan hal ini, maka penanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang tidak dapat ditunda, dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, serta merupakan komitmen bersama yang harus dilakukan secara sistematis, lintas sektor, lintas pelaku, terpadu dan berkelanjutan.

Secara umum definisi tentang kemiskinan, menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidakmampuan atau keterbatasan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan.

Kabupaten Karimun dalam melakukan pembangunan pada berbagai program pembangunan yang dilaksanakan senantiasa bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan. Persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten

Karimun, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan adalah bekerja dalam segala keterbatasan sementara persoalan kemiskinan semakin berkembang. Dari kondisi kemiskinan di Kabupaten Karimun yang merupakan sasaran program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Karimun**

<b>Kecamatan</b>	<b>Desa Tertinggal</b>	<b>Penduduk Kab.Karimun</b>	<b>Rumah Tangga Miskin</b>
Karimun	1	59.947	951
Meral	2	54.761	2.270
Tebing	1	29.665	613
Buru	1	11.042	1.319
Kundur	5	41.951	1.778
Kundur Utara	1	22.576	1.121
Kundur Barat	-	18.855	1.320
Moro	6	20.279	1.939
Durai	3	7.335	393
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>266.411</b>	<b>11.704</b>

*Data olahan 2013*

Untuk selalu dapat mengatasi permasalahan kemiskinan ini, maka Pemerintah Kabupaten Karimun berusaha untuk merangkum semua pihak (*stakeholders*) dalam menanggulangi kemiskinan seperti perusahaan BUMN, Badan Amil Zakat, serta pemerintah berbagai tingkatan (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau). Perkembangan terakhir dalam penanggulangan kemiskinan ini berupa adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk berkoordinasi dalam merencanakan dan melaksanakan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Karimun.



Adapun program-program pengentasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yaitu meliputi:

1. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita bagi Masyarakat Miskin / Desa Tertinggal.
2. Kegiatan Pengadaan Susu untuk Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kabupaten Karimun.
3. Kegiatan Perawatan Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Karimun.
4. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin/Desa Tertinggal (Jamkesda).
5. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu.
6. Pemberian Beasiswa bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin/Desa Tertinggal.
7. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
8. Pembangunan Solar Water Pump dan Sarana MCK.
9. Penyediaan Listrik Rumah Penduduk Miskin/Desa Tertinggal.
10. Pembinaan dan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin.
11. Bantuan Permodalan Usaha Simpan Pinjam Unit Program Pelayanan Kesejahteraan Khusus Perempuan.
12. Pengembangan Budidaya Rumput Laut.
13. Pengadaan Jaring Udang (APOLLO).
14. Pengadaan Jaring Tenggiri Monofilament (TANSI).

Tekad Pemerintah Kabupaten Karimun dalam upaya pengentasan kemiskinan dan selaras dengan upaya pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) tercermin dari alokasi dana untuk peningkatan ekonomi kerakyatan dan SDM, Dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2011).

Kemudian, kebijakan lainnya dalam pengentasan kemiskinan yakni adanya kerja sama atau kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengentasan di wilayah Kabupaten Karimun. Dan program tersebut merupakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (dilaksanakan masyarakat) yang pada akhirnya mampu memicu peningkatan produktifitas Perekonomian Masyarakat Pedesaan.

Hampir seluruh program/kegiatan pengentasan kemiskinan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Karimun telah dapat dilaksanakan, bahkan beberapa kegiatan kemajuannya atau realisasi fisiknya telah mencapai 100%.

Program RTLH di Kabupaten Karimun merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karimun yang pelaksanaannya dilimpah pada salah satu instansi pemerintah Kabupaten Karimun yaitu Dinas Sosial Kabupaten Karimun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.5 Tahun 2012.

Tahapan-tahapan pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni mengacu pada pendapat Solichin Abdul Wahab (2001:108), bahwa

tahapan-tahapan dalam implementasi, dengan demikian dapat diketahui penilaian masarakat terhadap pelaksanaan kebijakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut. Berikut tahapan-tahapan kebijakan berdasarkan penilaian masarakat sebagai berikut.

#### **5.1.1 Keluaran Kebijakan**

Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Keluaran kebijakan disini adalah merupakan peraturan yang telah di tetapkan dan menjadi dasar acuan untuk mengimplementasikan program RTLH di Kabupaten Karimun, yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Karimun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Peraturan Bupati berisi mengenai Tim pelaksana, tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan RTLH dan dijelaskan juga mengenai mekanisme pelaksanaannya dari awal hingga akhir.

Analisis kebijaksanaan adalah suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, kenapa mereka melakukan hal itu dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda – beda. Menurut PBB kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus,

luas atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, public atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu dasar atau bertindak. Suatu arah tindakan tertentu suatu program mengenai aktivitas – aktivitas tertentu atau suatu rencana .

Menurut Miftah Thoha (1984:45) kebijakan atau policy adalah sikap atau tindakan lebih lanjut tentang bagaimana caranya mencapai tujuan dalam hal tindakan ada ketentuan yang mengaturnya, mendasarkan kembali kepada asas pokok penyelenggaraan pemerintah.

“Ilmu policy” adalah study tentang proses pembuatan keputusan tau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia dan berguna untuk pemecahan masalah tertentu serta “policy” dirumuskan sebagai suatu keputusan yang disifati oleh adanya perilaku konsisten dan pengumpulan pada bagian dari keduanya yakni bagi orang – orang yang membuatnya dan orang yang melaksanakannya .

Hal senada juga disampaikan J. A. M. Mares dan Sunggono (1994) yang mengatakan bahwa ada beberapa factor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijaksanaan yaitu :

a. Isi Kebijaksanaan

Kebijaksanaan dikatakan gagal karena masih samanya isi dan tujuan kebijaksanaan, tidak memiliki ketetapan dan ketidaktegasan dalam bentuk intern ataupun ekstern dari kebijaksanaan itu sendiri

b. Sosialisasi

Terjadinya kekurangan informasi, maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik terhadap objek kebijaksanaan

ataupun kepada para pelaksana dari isi kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dan hasil – hasil dari kebijaksanaan itu. Kurangnya persebaran sosialisasi mengenai program RTLH, mengakibatkan informasi yang diterima masyarakat terbatas dan tidak adanya keseragaman pemahaman antar masyarakat tersebut terkait dengan pelaksanaan program tersebut.

Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan program RTLH untuk penanggulangan kemiskinan. Tanpa sosialisasi yang baik dan menyeluruh, besar kemungkinan timbul masalah dalam pelaksanaan program seperti salah sasaran dan lain sebagainya.

c. Dukungan

Didalam kebijaksanaan akan sangat sulit didalam pelaksanaannya jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijaksanaan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Dalam pembagian potensi antara para actor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang. Sedangkan George Edwards III (Hutahean Marlan, 1997 : 25) mengemukakan 2 premis untuk keperluan study implementasi kebijakan yaitu prakondisi – prakondisi apakah yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan serta hambatan – hambatan apa yang dihadapi dalam penerapannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut ia kemudian mengidentifikasi factor – factor yang dianggap mempengaruhi proses

implementasi kebijakan adalah (1) Faktor Komunikasi, (2) Faktor sumberdaya, (3) Faktor disposisi atau watak pelaksana (4) Faktor struktur birokrasi, pandangan Meter dan Horn dalam (Wibawa 1994) menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijakan sebelumnya, tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana yang telah disepakati. Studi implementasi program lebih menekankan pada pengujian faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian sasaran kebijaksanaan.

Untuk mengetahui sejauhmana keluaran kebijakan ini telah dipahami dan diikuti oleh penerima RTLH dapat dilihat melalui :

- a) Kesesuaian perbaikan rumah dengan Peraturan Bupati Karimun No.5 Tahun 2011

Pelaksanaan perbaikan rumah telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Karimun. Untuk mengetahui bagaimana implementasi RTLH tersebut peneliti telah melakukan pengamatan dilapangan, mewawancarai responden dan mengajukan angket kepada responden untuk mendapatkan kebenaran mengenai kesesuaian pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Karimun dengan peraturan yang ditetapkan. Dari hasil wawancara hampir semua responden mengatakan pelaksanaan RTLH sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, artinya rumah yang sebelumnya kurang layak dalam arti dinding papan rumah sudah lapuk dan atap yang bocor, sekarang telah diperbaiki menjadi rumah batako, ini merupakan

tujuan dari program RTLH dimana telah terjadi perubahan pada rumah tidak layak huni tersebut.

Sebelum penerima RTLH mendapat perbaikan rumah, mereka terlebih dahulu didata oleh Kepala Desa/Lurah serta Kecamatan dan setelah itu ditentukan siapa-siapa saja yang benar-benar layak untuk mendapat program RTLH ini. Menurut pengamatan dilapangan, penerima RTLH di Kabupaten Karimun sudah tepat sasaran, karena penerimanya adalah rumah tangga miskin yang benar-benar membutuhkan, hal ini tidak hanya dilihat dari kondisi rumah saja tetapi dari segi pekerjaan juga menjadi pertimbangan untuk mendapatkan program ini. Dari data yang diperoleh umumnya penerima RTLH di Kabupaten Karimun Tahun 2011 adalah para orang tua lanjut usia (lansia) karena mereka sudah tidak produktif lagi dan kemudian penerima dari rumah tangga miskin yang bekerja sebagai buruh bangunan atau buruh lepas.

Setelah menentukan penerima RTLH, mereka akan disosialisasi oleh Tim Koordinasi sebagai pelaksana program. Dari wawancara dengan responden, sosialisasi dilakukan dua kali pada saat itu akan dijelaskan mengenai semua mekanisme pengerjaan rumah dan akan ditetapkan juga kelompok-kelompok RTLH. Kelompok ini terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, mereka akan membuat semua pelaporan pelaksanaan kelompok mereka yang akan dibantu oleh pendamping. Pendamping ditetapkan melalui SK (Surat Keputusan) Bupati Karimun. Untuk mengetahui tentang kesesuaian pelaksanaan RTLH, peneliti mewawancarai Marwan sebagai pendamping di Kecamatan Meral, menurut beliau :

*“Kalau untuk Kecamatan Meral sudah dilaksanakan sesuai aturan dan penerimanya sudah tepat sasaran seperti janda-janda dan rumah tangga miskin lainnya. Bahkan warga yang tidak memiliki tanah atau rumahnya menumpang ditempat atau tanah orang lain atau saudaranya pun mendapat bantuan”.*(wawancara pada 12 february 2013).

Untuk melakukan *cross check* data, maka pernyataan pendamping RTLH di atas diklarifikasi melalui hasil wawancara dengan Suzana yang merupakan Ketua Kelompok Bunga Tanjung di Kelurahan Meral Kota. Beliau menjelaskan bahwa:

*“Sudah sesuai, dari tahap awal melakukan peninjauan kemudian diverifikasi lagi, ada kriteria tertentu untuk menetapkan penerima RTLH kita sesuaikan dengan keadaan wilayah, kita tidak bisa pakai acuan dari pemerintah pusat kalau tidak ada surat tanah gak bisa dapat RTLH, untuk kelurahan ini memang banyak RTM yang tanahnya menumpang, itu juga harus kita bantu. Kami juga sudah membuat surat pernyataan kepada pemilik tanah agar tanah yang ditumpangi tersebut tidak bermasalah nantinya, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Penyelenggaraan RTLH yang ditetapkan Bapak Bupati kita”.* (wawancara pada 12 february 2013).

Dari paparan wawancara diatas, terlihat keseriusan dari pelaksana bahwa banyak rumah tangga miskin yang mendapat bantuan RTLH. Bahkan masyarakat yang tidak memiliki tanah atau rumah sewa atau menumpang ditanah saudaranya atau orang lain juga mendapat bantuan. Menurut Peraturan Bupati Karimun Nomor 05 Tahun 2011, salah satu syarat untuk mendapat Program RTLH adalah



memiliki rumah diatas lahan sendiri atau orang lain atau menyewa baik di badan usaha atau tanah saudara serta pinggiran pantai juga mendapat bantuan dengan dibuktikan dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Kriteria penerima program RTLH didasarkan pada kondisi wilayah Kabupaten Karimun karena kriteria rumah tangga miskin setiap wilayah di Indonesia memang berbeda, kriteria tersebut sudah dipenuhi untuk setiap penerima program di Kabupaten Karimun dan fakta dilapangan memang tidak ditemukan penerima yang tidak tepat sasaran.

Terlepas dari kriteria penerima RTLH yang tepat sasaran serta mekanisme pelaksanaannya yang sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, pembahasan selanjutnya mengenai dana yang diberikan. Menurut mereka dengan dana sebesar Rp.20.000.000 dipotong dengan upah tukang sebesar Rp.2.500.000, tanggung untuk membuat sebuah rumah 6x6 belum lagi bagi keluarga yang anak-anaknya banyak, jadi mereka harus menambah dana dari kantong sendiri. Dari hasil wawancara mengungkapkan bahwa semua penerima RTLH menambah biaya perbaikan rumah bahkan sampai menjual harta benda untuk mempersiapkan rumah tersebut, hal ini akan menjadi beban pikiran bagi penerima karena harus menambah dana lagi sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sulit. Jika melihat kembali tentang tujuan program RTLH, adalah untuk membantu RTM yang belum memiliki rumah yang layak untuk kedepan bisa memiliki rumah yang layak, tapi dengan dana yang minim penerima kesulitan untuk melaksanakan program ini, bahkan penerima RTLH Ahmad Daud mengatakan bahwa,

*“saya memiliki anak banyak jadi tidak mungkin bikin rumah cuma 6x6, sebenarnya masih kurang dananya tapi saya bersyukur udah dapat bantuan dari pemerintah”(wawancara 13 februari 2013).*

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa penerima RTLH mengalami kesulitan untuk mempersiapkan rumah yang telah dibantu oleh pemerintah. Mungkin tidak akan menjadi kesulitan bila penerima RTLH memiliki tabungan atau uang simpanan, bisa digunakan untuk menambah kebutuhan perbaikan rumah yang kurang, tetapi akan menjadi sulit jika tidak memiliki uang simpanan maka perbaikan rumah akan terhambat.

Standart ukuran rumah RTLH menurut Peraturan Bupati Karimun, adalah 6x6m dengan satu kamar, tetapi dari hasil pengamatan lapangan banyak ditemukan ukuran pembuatan rumah yang tidak mengikuti standart dari pemerintah, penerima RTLH membuat melebihi standart karena menurut mereka terlalu sempit untuk sekeluarga dengan ukuran rumah 6x6, mereka menambah ukuran rumah mengingat rumah yang akan dihuni adalah rumah permanen yang akan dipakai untuk waktu lama. Setiap orang yang akan membuat rumah pasti akan membuat sedikitnya dua kamar, tidak memungkinkan jika sebuah keluarga memiliki rumah hanya dengan satu kamar, begitu pula dengan penerima RTLH pasti berpikir akan membuat sebuah rumah yang nyaman untuk keluarganya.

Kebutuhan akan perumahan atau tempat tinggal sangat dirasakan setiap manusia, karena perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak

dipenuhi. Kebutuhan akan rumah saat ini menjadi prioritas utama bagi setiap orang. Fungsi dari sebuah rumah sekarang bukan hanya sekedar sebagai tempat berteduh saat panas ataupun hujan, tapi lebih dari itu semua rumah merupakan tempat terbaik untuk membina keluarga bahagia dan sejahtera. Tidak heran kalau sekarang banyak orang berlomba untuk mendapatkan dan membuat sebuah rumah yang nyaman untuk dihuni sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program RTLH berdasarkan Peraturan Bupati No. 05 Tahun 2011 telah dilaksanakan dengan baik, hal ini senada dengan pendapat Merilee S. Grindle ( dalam Winarno 2012:149) mengatakan bahwa : “implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bias direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan”

Dalam merumuskan suatu kebijakan diperlukan adanya model kebijakan sebagai suatu patokan dalam menyusun suatu kebijakan, adapun model yang dipakai adalah model Merilee S. Grindle (1980). Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. ( Samoedra Wibawa, 1994 : 22 ) Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Pada prinsipnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. *Pertama*, adalah apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dicapai.

*Kedua*, adalah “tepat pelaksanaannya”. Aktor implementasi kebijakan yang dapat menjadi pelaksanaan yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. “Tepat” *ketiga* adalah “tepat target”. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi

target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target dan kondisi mendukung atau menolak.

*Keempat* adalah “tepat lingkungan”. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan yang merupakan interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang lebih dekat. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari *public opinion* atau persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individualis* yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasikan kebijakan.

Keempat “tepat” tersebut masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan yaitu dukungan politik, dukungan strategik dan dukungan teknis.

- b) Pencairan dana dilakukan dua tahap dan Pendistribusian bahan bangunan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan

Ketepatan proses pencairan dana merupakan hal terpenting dalam program RTLH, karena dana inilah yang nantinya akan digunakan untuk merehab rumah penerima program dan mengenai pendistribusian bahan bangunan yang dibutuhkan adalah ketepatan kuantitas dan kualitas prasarana program RTLH karena harus melihat kesesuaian kebutuhan dari rumah yang akan direhab. Dari

hasil wawancara dengan responden, seluruhnya mengatakan bahwa proses pencairan dana dan pedistribusian bahan bangunannya sudah efektif, karena apabila dana cair akan langsung dipakai untuk memesan bahan bangunan, jadi penerima RTLH tidak memegang dana tersebut tapi berupa bahan bangunan yang dibutuhkan. Untuk mencairkan dana tersebut, setiap kelompok memiliki satu buku rekening yang nantinya akan digunakan untuk mengambil dana RTLH ke Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah yaitu Bank Riau Kepri, jadi ketua kelompok bersama bendahara yang nantinya akan mencairkan dana tersebut didampingi oleh Lurah dan pendamping yang sebelumnya Lurah telah mengantarkan surat rekomendasi kepada pimpinan Bank bahwa akan mencairkan dana RTLH untuk setiap kelompok.

Pada pelaksanaan RTLH di Kabupaten Karimun, Pencairan dana dilakukan dua tahap, padahal pada peraturan Bupati Karimun dana akan dicairkan melalui dua tahap yaitu 85 persen dan 15 persen. Ada ketentuan dalam pencairan dana RTLH, dimana rumah setiap kelompok harus sama-sama siap 85 persen lalu dana 15 persen akan cair, hal ini dimaksudkan agar sesama penerima RTLH nantinya akan selesai memperbaiki rumah bersama-sama dan juga untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti penyelewengan dana, jadi dengan ini penerima akan sama-sama mengetahui dan ada kejelasan mengenai dana perbaikan rumah mereka, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak program-program pemerintah yang bermasalah mengenai dana program yang diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk orang-orang yang tidak mampu.

Untuk mengetahui benar atau tidaknya kabar yang mengatakan bahwa adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum disalah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun penulis mewawancarai Bapak Istanto yang merupakan Sekretaris Dinas Sosial yang merupakan Tim penyelenggara RTLH di Kabupaten Karimun beliau mengatakan :

*“Sebenarnya tidak ada masalah dengan proses RTLH kita, namun terjadi salah pengertian di sebagian orang yang tidak paham benar dengan segala proses penyelenggaraan bantuan ini. Proses pencairan dana yang ditetapkan Bupati dua kali pencairan inilah yang menjadi isu-isu penyelewengan dana tersebut”* ujarnya (wawancara 9 febuari 2013).

Mengenai pendistribusian bahan bangunan, antara pelaksana program dengan pihak toko bangunan yang ditunjuk telah melakukan suatu kesepakatan yang menyatakan bahwa, toko bersedia mengantarkan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima RTLH walaupun dana belum ada, jadi pembayaran akan dilakukan setelah dana dicairkan oleh ketua kelompok. Begitu juga dengan upah tukang, menurut peraturan Bupati Karimun, upah tukang akan dibayar setelah perbaikan RTLH selesai, namun berdasarkan wawancara dengan penerima, upah tukang dibayar perminggu atau perbulan, karena tukang banyak yang menolak jika dibayar terakhir. Untuk melakukan perbandingan data, berdasarkan hasil wawancara dengan Basir penerima RTLH yang merupakan salah satu ketua kelompok dalam proses pencairan dana dan pendistribusian bahan bangunan, mengatakan bahwa:

*“Proses efektif, yah pokoknya prosedur sudah sip baru dananya bisa cair, saya ngambil bersama sekretaris, bendahara, pendamping dan kelompok lain juga. Pencairan dibagi dua tahap, tahap pertama Rp. 17.500.000 tiap orang, langsung ke toko pesan bahan semuanya. Upah tukang harusnya dibayar terakhir, tapi kelompok kita bayar pertama Rp.500.000 ongkos tukang dibayar lima kali juga soalnya kita pakai tenaga orang dan dia juga butuh biaya kehidupannya jadi gak mungkin bayar terakhir setelah rumah siap. Pendistribusian bahan lancar kok, paling-paling kita lambat pengantaran aja kan toko banyak yang beli juga, yang bikin lambat kadang tuh jalan menuju lokasi tuh jelek, jadi agak susah (wawancara pada 14 februari 2013).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa dalam pendistribusian bahan bangunan perbaikan rumah masih ditemukan kendala yaitu keterlambatan pengantaran barang ke lokasi karena adanya bahan bangunan yang habis dan juga kondisi jalan menuju rumah penerima yang kurang bagus, namun dari wawancara yang dilakukan dengan penerima RTLH keterlambatan tidak sampai memakan waktu yang lama, paling lama 3 hari. Pendistribusian bahan bangunan ke penerima RTLH harus diketahui oleh Lurah dan ketua kelompok yang dilampirkan dalam faktur barang sehingga dapat melihat berapa dana yang sudah terpakai.

Penulis menarik kesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan sudah baik, karena dengan melakukan kerjasama antara pelaksana dengan pihak toko akan memudahkan penerima RTLH untuk memperbaiki rumah mereka dengan begitu



tidak ada kendala dalam pemesanan bahan bangunan karena barang yang dibutuhkan bisa dipesan tanpa menunggu dana cair meskipun mereka belum membayar. Apa yang dilakukan memang sudah baik, ini tidak lepas dari peran implementator sebagai pelaksana artinya mereka benar-benar ingin mempermudah penerima RTLH dalam merehab rumah.

c) Ketepatan waktu dalam perbaikan rumah

Dalam pelaksanaan program RTLH telah ditetapkan batas waktu untuk merehab rumah, yaitu 120 hari kerja atau 4 bulan kalender. Berdasarkan wawancara dengan penerima, hampir semua penerima mengatakan bahwa waktu pelaksanaan RTLH tepat waktu dan ada penerima mengatakan waktu pelaksanaan RTLH tidak cukup.

Program RTLH memiliki dua jenis, pertama untuk membangun rumah dari awal artinya rumah penerima yang dulu akan dibongkar dan yang kedua untuk rumah yang hanya direhab saja atau diperbaiki mana yang sudah tidak layak digunakan, seperti atap rumah yang bocor, dinding rumah papan yang lapuk dan menambahkan apa saja yang kurang bagus. Menurut wawancara, waktu pelaksanaan RTLH tidak cukup disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung, pengantaran barang yang lama dan ada penerima yang mengatakan mereka akan mengerjakan bila ada waktu saja, karena penerima RTLH juga memiliki pekerjaan yang harus dijalani, jika tidak bekerja maka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi banyak juga penerima RTLH yang menggunakan jasa tukang untuk mengerjakan rumah mereka, walaupun tukang tidak mengerjakan sampai selesai, alasan mereka biaya untuk membayar jasa

tukang sekarang ini tidak sama seperti dulu, saat ini jarang ada tukang yang mau jika dibayar Rp.50.000 per hari.

Pelaksanaan RTLH tidak tepat waktu juga disebabkan faktor cuaca yang kurang bersahabat, responden mengatakan jika cuaca hujan perbaikan rumah dihentikan hingga menunggu hari panas kemudian keterlambatan pengantaran bahan bangunan juga telah memakan waktu. Penjelasan ini juga dikemukakan oleh Halimun beliau mengatakan :

*“Yang saya ketahui tidak cukup, karena tergantung cuaca, kalau mau pasang atap lihat cuaca mendung gak jadi bongkar, karena RTLH ini kan untuk yang belum ada rumah, bahan bangunan juga ada yang datang terlambat, seperti bahan kayu sekarang kan sulit dicari walaupun ada gak bisa dimanfaatkan sebaik mungkin karena ada kayu yang bengkok jadi kami gak bisa pakai, yah dikembalikan lagi ketoko”* (wawancara pada 15 September 2012).

Dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan program RLTH tidak mencukupi disebabkan oleh faktor cuaca dan keterlambatan pengantaran barang yang kehabisan stok. Faktor lainnya adalah keterbatasan waktu yang dimiliki penerima RTLH karena harus bekerja. Menurut pengamatan yang dilakukan pada lokasi penerima RTLH, Pelaksanaan RTLH akan tepat waktu, jika rumah tersebut hanya direhab saja memang tidak akan memakan waktu yang lama, karena hanya memperbaiki yang rusak seperti atap yang bocor atau kamar mandi yang diperbaiki dan bagian rumah lainnya yang perlu untuk direhab, tetapi jika rumah

yang membangun dari awal akan memakan waktu lama, apalagi ukuran rumah penerima sudah tidak mengikuti standart dari pemerintah.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai indikator keluaran kebijakan, peneliti juga megajukan angket sebagai data tambahan dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat dari indikator Keluaran Kebijakan dapat dilihat dari jawaban masyarakat melalui pertanyaan-pertanyaan pada angket berikut.

**Tabel 5.2 Tanggapan Masyarakat Mengenai Pemerintah Kabupaten Karimun Telah Menetapkan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial RTLH Untuk Mempermudah Pelaksanaan Program Tersebut.**

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	44	51,16 %
2	Setuju	38	44,18 %
3	Kurang Setuju	4	4,65 %
4	Tidak Setuju	0	0 %
<b>Jumlah</b>		86	100 %

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Karimun telah menetapkan kebijakan tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam proses pelaksanaan program RTLH dengan pernyataan sangat setuju sebanyak 44 orang (51,16%), setuju 38 orang (44,18%), kurang setuju 4 orang (4,65%) dan tidak ada yank menyatakan tidak setuju. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa tanggapan masyarakat pada umumnya sangat setuju jika peraturan atau peraturan daerah kabupaten karimun no.5 tahun 2011 sangat mempermudah masyarakat dalam proses pelaksanaan bantuan RTLH.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai apakah kebijakan RTLH ini mampu mengurangi tingkat kemiskinan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.3 Tanggapan Masyarakat Mengenai Kebijakan Yang Dikeluarkan Telah Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Melalui Program RTLH**

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	47	54,65 %
2	Setuju	35	40,69 %
3	Kurang Setuju	4	4,65 %
4	Tidak Setuju	0	0 %
<b>Jumlah</b>		86	100 %

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kebijakan yang dikeluarkan telah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat dengan pernyataan sangat setuju sebanyak 47 orang (54,65%), setuju 35 orang (40,69%), kurang setuju 4 orang (4,65%) dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Dari tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa kebijakan pemerintah pemerintah Kabupaten Karimun telah sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karimun.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat apakah kebijakan yang dikeluarkan bupati Keputusan Bupati Karimun No.5 tahun 2011 telah mengatur seluruh proses pelaksanaan RTLH, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.4 Tanggapan Masyarakat Mengenai Kebijakan Yang Dikeluarkan Telah Mengatur Seluruh Prosedur Dalam Pelaksanaan Bantuan RTLH**

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	52	60,46
2	Setuju	30	34,88
3	Kurang Setuju	4	4,65
4	Tidak Setuju	0	0
<b>Jumlah</b>		86	100 %

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Karimun telah mengatur seluruh prosedur dalam pelaksanaan penyelenggaraan bantuan RTLH dengan pernyataan sangat setuju 52 orang (60,46 %), setuju 30 orang (34,88%), kurang setuju 4 orang (4,65%) dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalam kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Karimun telah mengatur semua prosedur pelaksanaan RTLH dengan sangat baik.

Untuk mengetahui rata-rata tanggapan masyarakat berdasarkan indikator keluaran kebijakan secara keseluruhan maka dapat dilihat pada rekapitulasi jawaban pada tabel berikut :

**Tabel 5.5 Rekapitulasi Jawaban Responden dari Indikator Keluaran Kebijakan**

No	Pernyataan	Kategori jawaban				Jumlah
		SS	S	KS	TS	
1	Pemerintah Kabupaten Karimun Telah Menetapkan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial RTLH Untuk Mempermudah Pelaksanaan Program Tersebut	44	38	4	0	86
2	Kebijakan Yang Dikeluarkan Telah	47	35	4	0	86

	Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Melalui Program RTLH					
3	Kebijakan Yang Dikeluarkan Telah Mengatur Seluruh Prosedur Dalam Pelaksanaan Bantuan RTLH	52	30	4	0	86
<b>Jumlah Rata-Rata</b>		<b>48</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>Persentase</b>		<b>55,81</b>	<b>39,53</b>	<b>4,65</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data olahan 2013*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rata-rata tanggapan responden terhadap indikator keluaran kebijakan dengan pernyataan sangat setuju 48 orang (55,81%), setuju 34 orang (39,53%), kurang setuju 4 orang (4,65%) dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kebijakan pemerintah kabupaten Karimun ini sangat mempermudah proses pelaksanaan dan sangat membantu masyarakat keluar dari tingkat kemiskinan dan tidak mempersulit masyarakat dalam memahami pesedur pelaksanaan RTLH ini.

Didalam indikator keluaran kebijakan ini dimana sudah seharusnya kebijakan merupakan cara atau sikap pemerintah didalam mencapai sebuah tujuan tertentu dengan selalu mendasarkan kebijakan tersebut pada asas-asas penyelenggaraan sebuah pemerintahan atau peraturan-peraturan khusus. Didalam proses implementasinya Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah mengeluarkan kebijakan atau strategi khusus didalam proses penyelenggaraan program rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Karimun. Berdasarkan data-data yang telah di kemukakan diatas maka dapat diketahui bahwa Pemerintah

Daerah Kabupaten Karimun telah sangat mempermudah masyarakat untuk memperoleh bantuan rumah yang layak huni ini dengan dibuktikan bahwa masyarakat yang tidak memiliki surat tanahpun bisa mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), jika dibandingkan dengan kebijakan dari pemerintah pusat bahwa masyarakat yang tidak memiliki surat tanah maka tidak akan mendapatkan bantuan.

Kebijakan ini juga telah memenuhi harapan didalam memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan sangat membantu masyarakat dari segi perekonomian. Dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berupa Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah mengatur semua proses penyelenggaraan rumah tidak layak huni (RTLH).

### **5.1.2 Kepatuhan Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari pemerintah dan dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karimun No.05. Pada dasarnya program yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah. Rakyat harus mampu menjadi partner dari pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah. Ini akan dapat mempermudah untuk mengadakan koreksi terhadap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi sehingga

akan dapat lebih mudah dan lebih cepat dibenahi, serta program dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dari hasil wawancara dengan penerima, warga merespon baik dan antusias terhadap program RTLH, meskipun ada beberapa penerima RTLH yang tidak mengikuti aturan pemerintah yaitu dalam ukuran rumah yang tidak sesuai. Dalam pelaksanaan RTLH, penulis melihat melalui seberapa besar motivasi penerima RTLH untuk merenovasi rumah mereka dan apakah implementator berperan aktif dan mengawasi pelaksanaan RTLH. Jika melihat kembali tentang program-program yang telah dibuat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin memang sering terjadi masyarakat banyak yang mengaku miskin agar mereka mendapatkan bantuan pemerintah seperti program Raskin dan BLT, hal ini sulit dihindari karena masyarakat yang tidak mendapat bantuan merasa cemburu atau ada kecemburuan sosial.

Agar program RTLH tidak salah sasaran, pemerintah telah menetapkan kriteria khusus bagi yang akan mendapat program ini, yaitu dengan melakukan pendataan di kecamatan dan kemudian ditindak lanjuti dengan penjajakan dilokasi sasaran penerima RTLH. Bagi penerima RTLH yang telah mendapat program ini, diharapkan dapat melaksanakan perbaikan rumah sesuai dengan ketentuan dalam sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian penulis mewawancarai Aswadi, dengan pertanyaan apakah dengan program ini, lebih termotivasi dengan memiliki rumah, beliau mengatakan:



*“Jelas kami pribadi termotivasi dengan adanya program ini, entah dengan jalan apa kami buat, itu motivasi kami sampai-sampai jual motor untuk perbaiki rumah. Kalau pemerintah ada datang mengawasi, dari Dinas Sosial sampai hapal sama saya”* (wawancara pada 16 februari 2013).

Dari wawancara diatas dikemukakan bahwa penerima RTLH sangat termotivasi dalam melaksanakan program ini. Ini terbukti mereka rela menjual harta yang mereka miliki untuk menambah perbaikan rumah tersebut karena dana yang diberikan tidak mencukupi. RTLH ditujukan untuk RTM yang rumahnya sudah tidak layak untuk dihuni, mereka sangat terbantu dengan program ini dijelaskan melalui wawancara, bahwa mereka bersyukur dengan rumah yang sekarang telah diperbaiki.

Melihat dari aspek kehidupan para penerima, memang sulit bagi mereka untuk membuat sebuah rumah, walaupun dibenak mereka ada keinginan untuk memiliki sebuah rumah yang nyaman untuk dihuni bersama keluarga, tapi keinginan itu mungkin akan jauh dari harapan jika pemerintah tidak membantu para RTM ini, maka dengan adanya program RTLH mereka sangat termotivasi untuk mewujudkan impian mereka bahkan rela menjual harta bendanya untuk membuat sebuah rumah. Untuk lebih jelas lagi, simak hasil wawancara dengan bapak Ar Rahman pendamping di Kecamatan Kundur Utara berikut ini :

*“Jelas mereka sangat berterima kasih kepada pemerintah, karena rumah mereka yang dulu bocor, reok artinya sudah ada motivasi mereka untuk*

*lebih meningkatkan kehidupan mereka karena sudah layak untuk dihunikan tentang pelaksana jelas mereka mengawasi, tanpa keaktifan mereka ini akan gagal karena ada fungsi koordinasi, struktural Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. Kami sering ikut rapat, tahap pertama adalah perencanaan, pengantaran barang, pembangunannya sampai tahap penyelesaian itu terus diawasi, makanya kegiatan RTLH yang ada di Kecamatan Kundur Utara ini Alhamdulillah tidak bermasalah (wawancara pada 17 ferbruari 2013).*

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RTLH sudah diawasi oleh Tim Koordinasi selaku pelaksana program, tanpa keaktifan mereka program ini tentu akan gagal. Penerima RTLH membutuhkan motivasi dari pelaksana yang telah memberikan bantuan, karena dengan begitu mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah. Program ini adalah sebagai pemancing atau perangsang bagi RTM agar mereka termotivasi untuk membuat rumah mereka layak dihuni karena itu diharapkan agar penerima dapat menambah dana yang kurang, namun tidak semua penerima mampu menambah dana yang tersebut.

Tim Koordinasi berperan penting dalam pelaksanaan RTLH, keaktifan mereka memberi dampak positif bagi keberlangsungan program, karena keberhasilan program juga tergantung seberapa besar keterlibatan implementator untuk kesuksesan program. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksana RTLH telah memberikan motivasi bagi penerima program dan ikut berperan aktif didalamnya karena menurut wawancara dengan penerima, mereka mengatakan bahwa pihak

Dinas Sosial, pemerintah Kecamatan, Kelurahan sering melakukan pengawasan dilokasi.

Kepatuhan kelompok sasaran merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tanggapan responden dari indikator Kepatuhan Kelompok Sasaran dapat dilihat pada hasil kuisioner di bawah ini:

**Tabel 5.6 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Perbup Karimun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan RTLH di Kabupaten Karimun Tahun 2011.**

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	81	94,18 %
2	Setuju	5	5.82 %
3	Kurang Setuju	0	0 %
4	Tidak Setuju	0	0 %
<b>Jumlah</b>		86	100 %

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan RTLH telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun No.5 tahun 2011 dengan pernyataan sangat setuju 81 orang (94,18%), setuju 5 orang (5,82%) dan tidak ada responden yang menyatakan kurang bahkan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat melaksanakan dengan baik segala kerentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati tersebut.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai ketepatan waktu dalam proses pelaksanaan pembangunan RTLH maka dapat dilihat pada tabel hasil kuisioner berikut ini :

**Tabel 5.7 Tanggapan Responden Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Proses Pembangunan RTLH Berdasarkan Perbup Nomor 5 Tahun 2011.**

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	32	37,20 %
2	Setuju	48	55,82 %
3	Kurang Setuju	6	6,98 %
4	Tidak Setuju	0	0 %
<b>Jumlah</b>		86	100 %

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai ketepatan waktu dalam proses pelaksanaan pembangunan RTLH terhadap Peraturan Bupati no.5 Tahun 2011 dimana 32 orang menyatakan sangat setuju (37,20), 48 orang menyatakan setuju (55,825), 6 orang menyatakan kurang setuju (6,98%) dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ketepatan waktu didalam proses pembangunan RTLH ini sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat apakah proses pencairan dana bantuan RTLH sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan maka dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.8 Tanggapan Responden Mengenai Pencairan Dana Bantuan RTLH Sesuai Dengan Perbup Nomor 5 Tahun 2011**

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	63	73,25 %
2	Setuju	23	26,75 %
3	Kurang Setuju	0	0 %
4	Tidak Setuju	0	0 %
<b>Jumlah</b>		86	100 %

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai proses pencairan dana RTLH telah sesuai dengan peraturan Bupati No.5 tahun

2011 dengan pernyataan sangat setuju 63 orang (73,25%) dan pernyataan setuju 23 orang (26,75%). Dari tabel diatas dapat diketahui responden melakukan pencairan dana bantuan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk mengetahui rata-rata indikator kepatuhan kelompok sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.9 Rekapitulasi Jawaban Responden dari Indikator Kepatuhan Kelompok Sasaran.**

No	Pernyataan	Kategori jawaban				Jumlah
		SS	S	KS	TS	
1	Pelaksanaan Perbuatan Bupati Karimun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan RTLH Telah Terlaksana Sesuai Dengan Ketentuan yang Ditetapkan	81	5	0	0	86
2	Pelaksanaan Pembangunan RTLH Sesuai Dengan Ketetapan Waktu yang Telah Ditentukan Dalam Peraturan Bupati	32	48	6	0	86
3	Pencairan Dana Bantuan RTLH Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011	63	23	0	0	86
<b>Jumlah Rata-Rata</b>		<b>58</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>Persentase</b>		<b>67,44</b>	<b>30,23</b>	<b>2,33</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata tanggapan responden terhadap indikator kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dengan pernyataan sangat setuju 58 orang (67,44%), setuju 26 orang (30,23%)

dan kurang setuju 2 orang (2,33%). Maka dapat diketahui bahwa responden mematuhi dengan baik segala ketentuan yang telah ditetapkan didalam proses pelaksanaan program RTLH ini.

Didalam sebuah implementasi kepatuhan dari kelompok sasaran dari sebuah kebijakan juga memepengaruhi penentuan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi dari sebuah kebijakan. Dalam hal ini di masyarakat maupun pemerintah dituntun untuk berperan aktif untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Didalam proses penyelenggaraan program rumah tidak layak huni ini masyarakat dan pemerintah telah meyelenggarakan kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.5 Tahun 2011, baik dari segi waktu yang ditetapkan didalam proses pembangunan serta tahapan-tahapan didalam proses pencairan dana bantuan rumah tidak layak huni tersebut, hal ini dapat diketahui berdasarkan data-data diatas hasil kuisisioner atau angket yang diberikan kepada responden atau masyarakat.

### **5.1.3 Dampak Nyata Kebijakan**

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan.

Meter dan Horn (Wibawa, 1994:20) merumuskan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik secara individu

maupun yang dilakukan kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan didalam kebijakan.

Dari definisi tersebut dapat diuraikan bahwa adanya upaya untuk mentransformasikan kegiatan operasional serta didalam mencapai perubahan – perubahan seperti yang dirumuskan dalam keputusan kebijaksanaan implementasi kebijakan merupakan proses lebih lanjut dari formulasi kebijakan.

Dalam merumuskan suatu kebijakan diperlukan adanya model kebijakan sebagai suatu patokan dalam menyusun suatu kebijakan, adapun model yang dipakai adalah model Merilee S. Grindle (1980). Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. ( Samoedra Wibawa, 1994 : 22 ) Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Perubahan perilaku antar kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan. Kelompok sasaran benar-benar merasakan hasil nyata yang diperoleh dari perbaikan rumah RTLH. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit. Dengan adanya program RTLH, masyarakat yang tadinya tidak mampu membuat rumah yang layak huni, diharapkan kemudian berubah menjadi terbantu dan mampu membuat rumah yang layak untuk dihuni.

#### **5.1.3.1 Kondisi Rumah Setelah Mendapat Program RTLH**

Predikat rumah layak huni tidak cukup hanya dengan perbaikan fisik rumah semata, tapi juga perlu dibarengi dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang rumah layak huni. Ada beberapa kriteria rumah layak huni, antara lain:

1. Aman terhadap gangguan sosial lingkungan,
2. Nyaman dalam arti memenuhi aspek kesehatan, dan
3. Terjangkau dalam arti sesuai kemampuan daya beli.
4. Serta dinding rumah dan lantai harus tetap kering tidak lembab dan tidak berlantai tanah, Setiap ruang harus dilengkapi dengan ventilasi udara dan sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah.

(<http://www.hupakuan.com/beritadetail>)



Bagaimana kondisi rumah penerima RTLH di Kabupaten Karimun setelah mendapat program, dapat dilihat melalui observasi dan wawancara mendalam dengan penerima program. Peneliti mewawancarai Mahmudi, beliau mengatakan :

*“Rumah sudah tegak, tapi yah belum siap semua, plaster cuma bagian depan rumah saja, karena untuk difoto kemarin, yang bagian samping sama dalam belum diplaster, jendela masih ditutupi papan, atap separuh masih pakai yang lama, kan harus cukupin dananya mbak, itupun udah gak pakai upah tukang, kita kerjain sendiri”* (wawancara pada 18 Februari 2013).

Selanjutnya peneliti mewawancarai Efendi sebagai salah satu penerima RTLH, beliau mengatakan :

*“Rumah saya dulu belum siap Dek waktu tim koordinasi datang untuk melihat hasil setelah 4 bulan pengerjaan rumah saya, jadi dulu belum ditinggali. Rumah saya sengaja saya bikin agak besar mengapa ukurannya besar karena anak-anak saya banyak, terus duitnya kurang jadi yah belum siap waktu ditinjau oleh orang dinas”* (wawancara pada 18 Februari 2013).

Dari wawancara diatas, terlihat bahwa rumah yang belum siap mengalami hambatan dengan dana yang kurang, keadaan ini tidak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya karena pemerintah tidak mungkin membantu masyarakat lebih banyak lagi, karena ini merupakan dana pemancing atau perangsang agar masyarakat termotivasi dengan menambah dana rumah yang kurang tersebut. Menurut pengamatan peneliti lapangan bahwa keadaan rumah penerima RTLH

sudah cukup bagus tapi belum bisa dikatakan sempurna, karena ada beberapa rumah yang perlu dibenahi lagi.

#### **5.1.3.2 Meningkatkan Kesejahteraan Penerima RTLH**

Salah satu isu pokok permasalahan pembangunan perumahan pada tingkat daerah adalah kurangnya akses yang sama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan rumah yang layak. Kemampuan pemerintah yang terbatas dan berbagai sistem yang mempengaruhi kepemilikan rumah oleh seluruh masyarakat hanya menempatkan masyarakat dengan golongan ekonomi mampu yang hanya sanggup untuk memiliki rumah yang layak bagi tempat tinggalnya. Maka dari itu, dengan adanya program RTLH, masyarakat diharapkan bisa memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak tersebut dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan, ada beberapa warga yang mengatakan belum bisa merasakan peningkatan kesejahteraan tetapi ada juga yang sudah merasakan.

Tujuan program RTLH adalah dapat meningkatkan kehidupan mereka secara layak dan secara tidak langsung adalah untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Karimun. Penerima program RTLH di Kabupaten Karimun didominasi oleh orang tua lanjut usia (lansia), dan selebihnya adalah buruh atau bekerja serabutan. Apapun program pemerintah pasti memiliki dampak positif ataupun negatif, pada intinya mereka bersyukur telah dibantu oleh pemerintah. Menurut pengamatan peneliti bahwa rehabilitasi RTLH tidak secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, karena tingkat kesejahteraan tidak hanya

diukur dari kepemilikan rumah yang layak tetapi juga harus ditunjang dengan penghasilan seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan primier. Kemudian akan dikemukakan wawancara dengan Sulaiman penerima RTLH, beliau mengatakan :

*“Bagaimana ya, cuma agak tenang ajalah. Istilanya sudah dapat bantuan sudah alhamdulillah dek, kalau soal sejahtera masih belum”*.(wawancara pada 19 Februari 2013).

Kemudian untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai apakah penerima RTLH dapat merasakan peningkatan kesejahteraan mereka, peneliti mewawancarai Yuspandi sebagai Tim Pendamping Desa Sei.Sebesi, beliau mengatakan:

*“kalau menurut pandangan saya macam mana yah, kita juga tidak masuk kesitu, tapi artinya saya rasa terbantu mereka tidak akan repot-repot lagi melihat rumah yang atapnya bocor, tinggal menjalankan kehidupannya sehari-hari. Yang namanya sejahtera bisa dikatakan sejahtera dalam rumahnya yang sudah layak”* (wawancara pada 19 februari 2013).

Penerima RTLH merasakan ada peningkatan kesejahteraan dengan memiliki rumah yang layak, walaupun ada beberapa rumah yang memang perlu dibenahi lagi, itu semua kembali lagi kepada kemampuan penerima RTLH, apakah memiliki dana lebih atau tidak. Program RTLH tidak serta merta dapat meningkatkan kesejahteraan penerima, karena program ini adalah bantuan untuk memperbaiki rumah saja, artinya meningkatkan kesejahteraan rumah RTM, untuk kegiatan ekonomi mereka masih menekuni pekerjaan yang mereka kerjakan sebelumnya. Selanjutnya mengenai penerima yang telah merasakan adanya

peningkatan kesejahteraan mereka sedikit tenang setelah rumahnya diperbaiki, yang dulu atap rumah bocor sekarang sudah tidak bocor lagi.

Peningkatan kesejahteraan rumah telah dirasakan oleh penerima RTLH, rumah yang dulunya rusak sekarang telah diperbaiki dan sudah layak untuk dihuni, ada juga penerima RTLH yang rumahnya dulu hanya triplek sekarang telah dibangun rumah yang baru dengan batako. Dapat disimpulkan bahwa program RTLH dapat meningkatkan kesejahteraan penerima program dalam hal ini adalah kesejahteraan rumah, karena rumah adalah tempat untuk berteduh, melepas lelah, berinteraksi dengan anggota keluarga, bercengkrama dan lain sebagainya. Dengan memiliki rumah yang layak mereka merasa nyaman, tenang dan tentram, tidak lagi terbebani oleh atap rumah yang bocor dan khawatir akan banjir.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat dari indikator Dampak Nyata Kebijakan dapat dilihat dari jawaban masyarakat melalui pertanyaan-pertanyaan pada angket berikut :

**Tabel 5.10 Tanggapan Masyarakat Mengenai Hasil Pembangunan Dari Program RTLH Telah Memenuhi Kriteria Rumah Layak Huni.**

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	37	43,02 %
2	Setuju	49	56,98 %
3	Kurang Setuju	0	0 %
4	Tidak Setuju	0	0 %
<b>Jumlah</b>		86	100 %

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan masyarakat terhadap hasil pembangunan dari program RTLH telah memenuhi kriteria rumah layak huni

dengan pernyataan sangat setuju 37 orang (43,02%), dan setuju 49 orang (56,98%) dan tidak ada pernyataan responden yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju. Dari data diatas dapat di ketahui bahwa pembangunan program RTLH telah memenuhi kritesia-kriteria rumah layak huni yang sudah selayaknya untuk dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai penerima bantuan social telah tepat sasaran maka dapat diketahui melalui table berikut ini :

**Tabel 5.11 Tanggapan Masyarakat Mengenai Penerima Bantuan Sosial Dari Program RTLH Telah Tepat Sasaran.**

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	51	59,30 %
2	Setuju	35	40,70 %
3	Kurang Setuju	0	0 %
4	Tidak Setuju	0	0 %
<b>Jumlah</b>		86	100 %

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai bahwa penerima bantuan program RTLH telah tepat sasaran dengan pernyataan sangat setuju 51 orang (59,30%), setuju 35 orang (40,70%), dan tidak ada responden yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerima bantuan RTLH ini telah tepat pada sasarannya yaiturumah tangga miskin.

Penulis juga mewawancarai Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang juga berperan mengklarifikasikan calon penerima bantuan RTLH yaitu Bapak Istanto,

*“semua nama calon penerima bantuan yang kami terima dari kecamatan telah kami tinjau kembali dan semuanya sudah sesuai dengan ketentuan, untuk menanggapi pernyataan adanya keluarga dari golongan yang mampu mendapatkan bantuan kami tegaskan tidak ada penerima RTLH kita yang mampu dari segi ekonomi mendapatkan bantuan”* ujarnya (wawancara 19 februari 2013).

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai dana bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bupati Karimun dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.12 Tanggapan Masyarakat Mengenai Bantuan Dana yang Diberikan Untuk Melaksanakan Program RTLH Digunakan Sesuai Dengan Ketentuan.**

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	79	91,86 %
2	Setuju	7	8,14 %
3	Kurang Setuju	0	0 %
4	Tidak Setuju	0	0 %
<b>Jumlah</b>		86	100 %

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai dana yang diberikan untuk melaksanakan program RTLH digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dengan pernyataan sangat setuju 79 orang (91,86%), setuju 7 orang (8,14%) dan tidak ada reponden yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat benar-benar menggunakan dana bantuan untuk memperbaiki rumah mereka.

Untuk mengetahui rata-rata pernyataan masyarakat atau responden penerima bantuan RTLH dari indikator dampak nyata kebijakan dapat diketahui pada tabel hasil kuisioner berikut :

**Tabel 5.13 Rekapitulasi Jawaban Responden dari Indikator Dampak Nyata Kebijakan.**

No	Pernyataan	Kategori jawaban				Jumlah
		SS	S	KS	TS	
1	Hasil Pembangunan Dari Program RTLH Telah Memenuhi Kriteria Rumah Layak Huni	37	49	0	0	86
2	Penerima Bantuan Sosial Dari Program RTLH Telah Tepat Sasaran	51	35	0	0	86
3	Bantuan Dana yang Diberikan Untuk Melaksanakan Program RTLH Digunakan Sesuai Dengan Ketentuan	79	7	0	0	86
<b>Jumlah Rata-Rata</b>		<b>56</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>Persentase</b>		<b>65,11</b>	<b>34,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata pernyataan responden dari indikator dampak nyata kebijakan dengan pernyataan sangat setuju 56 orang (65,11%), setuju 30 orang (34,89%) dan tidak ada responden yang menyatakan kurang setuju bahkan tidak setuju. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan RTLH benar-benar memenuhi kriteria rumah yang layak huni, penerima bantuan RTLH ini pun telah tepat sasaran dan dana yang diberikan sudah digunakan sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Karimun No.5 tahun 2011.

Program rumah tidak layak huni diterapkan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat miskin yang pada umumnya tidak terlalu memperhatikan kondisi rumah mereka dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan pakaian mereka masih tidak mencukupi bagi mereka. Di dalam program rumah tidak layak huni ini target atau sasaran kebijakan sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu penerima bantuan rumah tidak layak huni ini adalah rumah tangga- rumah tangga miskin dan masyarakat lanjut usia. Dan untuk kriteria rumah yang layak huni, masyarakat telah mendapatkan rumah yang aman dan nyaman. Berdasarkan data-data wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa masyarakat telah mendapatkan dampak positif dari pembangunan ini serta kenyamanan bertempat tinggal yang layakpun telah didapatkan dengan rumah berlantaikan semen, dinding serta atap yang tidak lagi bocor atau ditambal-tambal serta adanya fasilitas mandi cuci kakus yang dahulunya masih banyak yang belum dimiliki oleh masyarakat.

Dampak nyata yang lain dari kebijakan ini berupa terwujudnya rumah yang diinginkan dari program rumah tidak layak huni ini dari dana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dengan kata lain dana yang diberikan memang benar-benar digunakan masyarakat untuk membangun rumah mereka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.5 Tahun 2011.



#### 5.1.4 Persepsi terhadap dampak

Dalam pengertian yang luas, rumah tinggal bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan. Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan untuk menikmati kehidupan, beristirahat dan bersuka ria bersama keluarga. Di dalam rumah, penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini. Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya; lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya.

Persepsi terhadap pemahaman yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur dan dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima RTLH. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai apakah penerima RTLH merasakan manfaat program dengan sedikit mengurangi beban pikiran atau beban keluarga. Wawancara dengan beberapa penerima yang menerima RTLH di Kabupaten Karimun mengatakan bahwa telah merasakan manfaat dari program ini dan tidak dipungkiri bahwa mereka sangat terbantu dengan program RTLH, karena menurut mereka jika tidak ada program ini mungkin tidak bisa memiliki rumah yang layak. Berikut hasil wawancara dengan responden penerima program Muhammad Karim, beliau mengatakan :

*“Dalam bathin ada merasakan lah, dan merasa terbantu karena yang mendapat RTLH ni orang-orang seperti kami, memang layak untuk dibantu”* (wawancara pada 19 september 2012).

Kemudian untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang apakah penerima RTLH dapat merasakan manfaat program, akan dikemukakan wawancara dengan Bapak Kamed Riyadi selaku Tim Pendamping Kecamatan Kundur Barat, beliau mengatakan :

*“Tanggapan mereka sangat berterimakasih walaupun dana itu ada yang merasa kurang dan manfaat nya betul-betul dapat dirasakan dengan RTLH ini dan yang jelas mereka mengharapakan tahun depan ada peningkatan dalam RTLH, namun bantuan ini kan dana bergulir, jadi kita tetap membantu sesuai anggaran proyek dari pemerintah, APBN, APBD”*  
(wawancara pada 21 februari 2013).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program RTLH dapat mengurangi beban pemikiran penerima RTLH, mereka dapat memenuhi kebutuhan untuk rumah yang layak, karena dengan pekerjaan mereka tentu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi untuk membuat rumah sekalipun mungkin jauh dari angan-angan mereka. Setidaknya program RTLH ini telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat miskin artinya bahwa ada tanggapan yang positif dari penerima RTLH, mereka menginginkan agar program ini dapat terus terlaksana dan ada peningkatan dalam dana yang diberikan, dengan dana yang cukup tidak akan lagi kendala yang dihadapi oleh penerima, karena berdasarkan hasil wawancara bahwa dana yang diberikan tidak mencukupi, sehingga menjadi beban pemikiran bagi penerima.

Persepsi terhadap dampak juga dapat dilihat melalui manfaat sosial, manfaat budaya, manfaat politik dan ekonomi. Mengenai manfaat sosial dari

program RTLH, program ini dapat meningkatkan kehidupan social dari kehidupan sehari-hari penerima RTLH, manfaat budaya bahwa program RTLH dapat meningkatkan sikap saling bergotong royong dan bekerjasama dengan mengikuti kaidah dan norma yang berlaku didaerah. Manfaat politik yaitu, program RTLH tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan RTM tetapi juga untuk mewujudkan masyarakat yang dapat hidup bersama-sama dengan tidak melihat perbedaan. Manfaat ekonomi yaitu program RTLH telah meningkatkan kesejahteraan penerima dengan memiliki rumah yang layak.

Perubahan perilaku setelah mendapatkn program RTLH dapat terlihat dengan dapat menjaga keutuhan rumah setelah diperbaiki dan juga telah ada peningkatan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang kurang, tidak saja melalui kerja keras tetapi juga usaha-usaha untuk memotivasi mewujudkan rumah yang lebih bagus lagi.

Pesepsi terhadap dampak yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan rehabilitasi sosial RTLH tersebut.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat dari indikator Keluaran Kebijakan dapat dilihat dari jawaban masyarakat melalui pertanyaan-pertanyaan pada angket berikut.

**Tabel 5.14 Tanggapan Masyarakat Mengenai Dengan Ditetapkannya Kebijakan Bantuan Sosial Dari Program RTLH Sangat Membantu Masyarakat.**

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	69	80,23 %
2	Setuju	17	19,77 %
3	Kurang Setuju	0	0 %
4	Tidak Setuju	0	0 %
<b>Jumlah</b>		86	100 %

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai dengan ditetapkannya kebijakan bantuan RTLH sangat membantu masyarakat dengan pernyataan sangat setuju 69 orang (80,23%), setuju 17 orang (19,77%) dan tidak ada responden atau masyarakat yang menyatakan kurang setuju bahkan tidak setuju. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bantuan RTLH yang diberikan kepada masyarakat benar-benar sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan papannya atau rumah yang layak.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat atau responden mengenai kepuasan mereka terhadap hasil dari pelaksanaan bantuan RTLH dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.15 Tanggapan Masyarakat Mengenai Kepuasan Masyarakat Dengan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Bantuan Sosial RTLH.**

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	79	91,86 %
2	Setuju	7	8,14 %
3	Kurang Setuju	0	0 %
4	Tidak Setuju	0	0 %
<b>Jumlah</b>		86	100 %

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan masyarakat atau responden mengenai kepuasan mereka terhadap hasil pelaksanaan pembangunan bantuan RTLH dengan pernyataan sangat setuju 79 orang (79,86%), setuju 7 orang (8,14%) dan tidak ada responden yang menyatakan kurang setuju serta tidak setuju. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat benar-benar puas terhadap hasil dari program RTLH ini.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat atau responden mengenai kebijakan Bupati Karimun berupa Peraturan Bupati No.5 tahun 2011 apakah mempersulit masyarakat maka dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.16 Tanggapan Masyarakat Mengenai Kebijakan yang Dikeluarkan Tidak Mempersulit Masyarakat Untuk Mendapatkan Bantuan Sosial RTLH.**

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	58	67,44 %
2	Setuju	28	32,56 %
3	Kurang Setuju	0	0 %
4	Tidak Setuju	0	0 %
<b>Jumlah</b>		86	100 %

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan masyarakat mengenai kebijakan yang dikeluarkan tidak mempersulit masyarakat untuk mendapatkan bantuan RTLH dengan pernyataan sangat setuju 58 orang (67,44%), setuju 28 orang (32,56%) dan tidak ada masyarakat atau responden yang menyatakan kurang setuju bahkan tidak setuju. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Karimun tidak mempersulit masyarakat untuk mendapatkan bantuan RTLH.

Untuk mengetahui rata-rata tanggapan responden atau masyarakat mengenai indikator persepsi terhadap dampak maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.17 Rekapitulasi Jawaban Responden dari Indikator Persepsi Terhadap Dampak.**

No	Pernyataan	Kategori jawaban				Jumlah
		SS	S	KS	TS	
1	Masyarakat Terbantu Dengan Ditetapkannya Kebijakan Bantuan Sosial Dari Program RTLH	69	17	0	0	86
2	Masyarakat Merasa Puas Dengan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Bantuan Sosial RTLH	79	7	0	0	86
3	Kebijakan yang Dikeluarkan Tidak Mempersulit Masyarakat Untuk Mendapatkan Bantuan Sosial RTLH	58	28	0	0	86
<b>Jumlah Rata-Rata</b>		<b>69</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>Persentase</b>		<b>80,23</b>	<b>19,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data olahan 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata pernyataan responden dari indikator persepsi terhadap dampak dengan pernyataan sangat setuju 69 orang (80,23%), setuju 17 orang (19,77%) dan tidak ada masyarakat atau responden pada indikator ini menyatakan kurang setuju bahkan tidak setuju. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya kebijakan bantuan RTLH ini, masyarakat juga merasa puas dengan hasil yang didapatkan dari pelaksanaan pembangunan RTLH tersebut, dan kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah Kabupaten Karimun untuk mendapatkan RTLH tidak mempersulit masyarakat.

Didalam suatu kebijakan terdapat pula berbagai persepsi atau tanggapan dari pihak-pihak tertentu serta masyarakat dalam suatu proses implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan data-data yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat benar-benar sangat terbantu didalam mewujudkan rumah yang yang selama ini selalu mereka impikan, dari hasil pembangunan atau rumah yang didapatkan pada umumnya masyarakat merasa sangat puas. Dan dari semua proses penyelenggaraan program rumah rumah tidak layak huni ini masyarakat senang karena kebijakan ini tidak mempersulit mereka bahkan sangat membantu mereka dari faktor ekonomi maupun kebijakan itu sendiri.

## **5.2 Kendala dalam Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Karimun.**

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan / penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak / hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dari hasil beberapa pemaparan diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya seluruh rangkaian kegiatan Pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Karimun sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam Pelaksanaanya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada didalam proses pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di semua kecamatan di Kabupaten Karimun.

Adapun kendala yang ditemukan dalam implementasi program RTLH ini adalah besarnya kisaran dana dalam suatu proses pembangunan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitu juga dalam program rumah tidak layak huni ini, dimana keberhasilan suatu proses rehabilitasi juga ditentukan oleh besar kisaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program RTLH ini.

Adapun mekanisme pencairan dana Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Karimun No.05 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

#### Pendanaan

##### a. Sumber Dana

Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi RTLH ini dibiayai melalui dana APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Karimun. Penyaluran dana Kegiatan Rehabilitasi RTLH ini melalui bantuan hibah dengan sistem Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

##### b. Besarnya Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Dana Bantuan Langsung Masyarakat dialokasikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per unit rumah penerima bantuan Rehabilitasi RTLH termasuk fasilitas sanitasi keluarga yaitu jamban keluarga bagi penerima bantuan tersebut yang belum memiliki jamban keluarga. Adapun rincian peruntukannya dari BLM tersebut yaitu 87,5% dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan dan 12,5%



dialokasikan untuk biaya pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (tukang).

#### Mekanisme Pencairan Dana

1. Penyaluran dana dimengerti sebagai proses penyaluran dana BLM dari pos belanja hibah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun ke rekening kelompok penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
2. Setiap kelompok penerima bantuan Rehabilitasi RTLH membuka rekening di Bank Pemerintah atas nama kelompok penerima bantuan dengan spesimen tanda tangan ketua dan bendahara.

#### Penyaluran Dana

- a. Kelompok penerima bantuan Rehabilitasi RTLH mengajukan nomor rekening kelompok beserta usulan Rehabilitasi RTLH ke Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- b. Dinas Sosial Kabupaten Karimun mengajukan permintaan pencairan dana bantuan Rehabilitasi RTLH ke Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dengan melampirkan SK Bupati Karimun tentang Penetapan Lokasi, Nama-nama Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH dan Kelompok Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH, proposal atau usulan Rehabilitasi RTLH serta rekening kelompok penerima bantuan Rehabilitasi RTLH.

- c. Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun akan mentransfer dana bantuan Rehabilitasi RTLH sesuai dengan nomor rekening kelompok penerima bantuan.
- d. Pencairan dana kegiatan Rehabilitasi RTLH dari rekening kelompok dapat dilaksanakan setelah kelompok mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

#### Proses Pencairan Dana Rehabilitasi RTLH

- a. Dana Rehabilitasi RTLH yang sudah masuk dalam rekening kelompok penerima bantuan dapat dicairkan dengan terlebih dahulu kelompok penerima bantuan mengajukan proposal atau usulan penggunaan dana yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan bendahara dengan rekomendasi pejabat Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- b. Proposal atau usulan tersebut menjadi dasar pencairan di bank tempat rekening kelompok penerima bantuan.
- c. Dana bantuan yang telah dicairkan dibelanjakan sesuai dengan proposal atau usulan dan peruntukannya.
- d. Bukti pembelian atau pembelanjaan menjadi bahan dalam penyusunan laporan kegiatan kelompok.

## Penggunaan Dana

Jumlah dana bantuan hibah untuk setiap unit rumah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan proporsi penggunaan sebagai berikut :

No.	URAIAN	BOBOT	JUMLAH (Rp)
1.	Pembelian bahan bangunan	87,5 %	17.500.000,-
2.	Biaya tukang	12,5 %	2.500.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>100 %</b>	<b>20.000.000,-</b>

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita lihat bahwa kisaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp.20.000.000,- dan Rp. 17.500.000,- per unit rumah yang akan direhabilitasikan. Namun kisaran dana tersebut masih dinilai kurang oleh sebagian penerima bantuan RTLH, seperti halnya yang di ungkapkan oleh Saifuddin yang menyatakan :

*“saya mendapat bantuan sebesar Rp. 17.500.000,- untuk merehab rumah, ya jelas kuranglah, keluarga saya banyak, tidak mungkinlah mau membangun rumah dengan satu kamar seperti ketentuan, sayakan tak punya simpanan yang banyak untuk menambah kekurangan”* (Wawancara 22 februari 2013).

Berakaitan dengan kurangnya dana yang diberikan untuk merehabilitasi rumah, sehingga penerima mengalami kesulitan untuk menyelesaikan rumah mereka. Mungkin tidak akan menjadi masalah bagi penerima yang memiliki sedikit tabungan untuk menambah kekurangan dari pembuatan rumah tetapi akan menjadi kendala apabila penerima tidak memiliki tabungan sehingga akan

menjadi beban pemikiran bagi penerima karena harus mempersiapkan rumah sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah sulit.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis dalam Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karimun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan khususnya pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak layak Huni sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
2. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karimun, diantaranya berupa kurangnya dana yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada kelompok sasaran dari program RTLH tersebut.
3. Terjadinya kendala yang lain berupa keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan rumah oleh kelompok sasaran dari waktu yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.5 Tahun 2011 yang disebabkan oleh keterlambatan datangnya bahan bangunan serta faktor cuaca yang tidak mendukung.
4. Adapun adanya indikasi penyelewengan dana yang diberitakan oleh media yang dilakukan oleh sekelompok orang merupakan kurangnya pemahaman

sekelompok orang tersebut tentang implementasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dalam proses pencairan dana bantuan program rumah tidak layak huni di Kabupaten Karimun.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada tim pelaksana kegiatan dimulai dari tingkat pusat sampai masyarakat agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program, pencairan dana bantuan serta upah harus tepat pada waktunya agar program terlaksana dengan baik dan program Rumah Tidak Layak Huni ini benar-benar menyentuh masyarakat miskin serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu ikut serta dan berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan program rumah tidak layak huni, usulan kegiatan hendaklah lebih melihat apa yang memang dibutuhkan masyarakat bukan melihat dari apa yang diusulkan pemerintah setempat saja, sehingga program tidak mengena kepada masyarakat miskin namun hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan maka dilakukan pemeliharaan sehingga hasil program bisa dimanfaatkan secara terus menerus oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin.1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Abdul Wahab, Solichin.2001. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn,N. William.2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Press : Yogyakarta.
- Husein, Umar. 2004, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hutahean, Marlan.1997. *Implementasi Kebijakan IDT Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Studi Kasus Di Desa Wakirharjo Kecamatan Prambanan, Tesis magister)*. Program Studi Magister Administrasi Public Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
- Islami, M. Irfan. 1991. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasaribu I.L dan B. Simandjuntak.1982. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito.
- Putro.S.T.1995.*Peranan Koperasi Dalam Mengentaskan Kemiskinan* .Makalah Disampaikan pada Seminar Kemiskinan Dalam Rangka Dies Natalis UNRI ke32 : Pekanbaru.
- Sugiyono. 2009. *Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto,Edi.dkk.2009. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Di Indonesia*. Bandung: STKS Press.
- Sunggono.Bambang.1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilo,W.2007. *101 Kesalahan Konsepsi Pengembangan Implementasi SMM ISO 9001*. Jakarta: Jose Eka Patra.
- Thoha, Miftah.1984. *Dimensi – Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Tulung,H. Freddy.2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.
- Wibawa,Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya :

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2011

Undang – undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman

Sumber Internet :

[www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id)

<http://batam.tribunnews.com/2012/03/16/penyelewengan-dana-rtlh-seret-aparat-desadan-pns>

<http://detifcom.blogspot.com/2011/10/dewan-ancam-pidanakan-dinsos-dan-dpu.html>